

TESIS

**RESPON PEREMPUAN ISLAM TERHADAP
KELUARGA BERENCANA**

*Studi Kasus Pada Perempuan Islam
di Pondok Pesantren Darul Istiqamah
Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan*



**Oleh
RATNA EDY
NIM. 099712749 M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**RESPON PEREMPUAN ISLAM TERHADAP
KELUARGA BERENCANA**

*Studi Kasus Pada Perempuan Islam
Di Pondok Pesantren Darul Istiqamah
Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan*

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

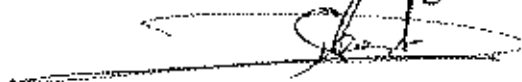
**Oleh
RATNA EDY
NIM. 099712749 M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

HALAMAN PENGESAHAN


**Tesis ini Telah Diujikan
Tanggal 24 Maret 2000**

**Oleh
Pembimbing**



**Dede Oetomo, Ph.D
NIP. 131453131**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



**Dr. Laurentius Dyson P., MA
NIP. 130937724**

Telah Diuji Pada

Tanggal 24 Maret 2000

Panitia Penguji Tesis:

Ketua : DR. Laurentius Dyson P., MA

Anggota : Prof. Soetandyo Wignyosoebroto,MPA

Dede Oetomo, Ph.D

Daniel Theodore Sparinga, Ph.D

Drs. Haryadi, MA

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Kupersembahkan

Kepada

Bangsa dan Almamater

Kedua Orang Tua serta Mertua

Suami tercinta Fuad Syuaeb

Buah hati Nur Izzah Fuad

Serta saudara-saudaraku

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sejak awal studi sampai selesai. Oleh karena itu pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Dede Octomo, Ph.D, selaku pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D, sebagai mantan KPS Ilmu-Ilmu Sosial dan Bapak Dr. Laurentius Dyson P., MA sebagai KPS Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Bapak Prof. Dr. Soedijono, dr, dan Staf atas kesempatan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
4. Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D, yang telah memberikan kepada penulis untuk mengikuti program Magister di Universitas Airlangga Surabaya.
5. Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar Program Pascasarjana dan juga

telah memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelesaian studi di Program Pascasarjan Universitas Airlangga Surabaya.

6. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang memberikan bantuan sejak dari awal keberangkatan untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga hingga selesai.
7. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Maros dan jajarannya yang telah memberikan bantuan dan izin untuk melaksanakan pendidikan ini.
8. Bapak Dr. Laurentius Dyson P., MA (Ketua Penguji), Bapak Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA (Anggota), Bapak Dede Oetomo, Ph.D (Anggota), Bapak Daniel Th. Sparinga, Ph.D (Anggota) dan Bapak Drs. Haryadi, MA (Anggota) yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah dan seluruh masyarakat yang ada dan sejumlah warga yang siap untuk menjadi subyek penelitian sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semua pihak tanpa menyebut nama satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terwujudnya tesis ini.

Ibunda tercinta dan terkasih Hj. Sahri Bulan (Alm) dan Ayahanda Ahmad Edy, mertua H. Syuaeb Mas'ud dan Hj. Rahbiah yang selalu memberikan dorongan dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Secara khusus terima kasih dan kekaguman kepada suamiku yang tercinta Fuad Syuaeb, SH dan anakda yang terkasih Nur Izzah Fuad, adik Netty

Herawaty Edy, atas pengertian, pengorbanan serta perjuangan yang selalu menyertai saya dalam menempuh pendidikan.

Mudah-mudahan segala dorongan, bantuan kerja sama dan pengorbanan dari berbagai pihak semoga mendapat limpahan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT.

Surabaya, 24 Maret 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan Penelitian.....	8
Manfaat Penelitian.....	8
Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN.....	10
Keluarga Berencana.....	10
Konsep Ideologi.....	22
Teori Hegemoni Gramsci.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
Metode Penelitian Yang Digunakan.....	32
Lokasi dan Subyek Penelitian.....	33
Teknik Pengumpulan Data.....	37
Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
Keadaan Penduduk Kab. Maros Ditinjau dari Kesertaan BerKB.....	48
Profil Wilayah dan Masyarakat Pondok Pesantren darul Istiqamah.....	52
- Keadaan Geografis dan Fisik.....	55
- Kependudukan.....	57
BAB V TEMUAN LAPANGAN.....	62
Pesan Tentang Penolakan KB.....	62
Resistensi Dalam Penolakan KB.....	66
Pemahaman Perempuan Islam Tentang KB.....	67
- Pengetahuan Subyek Tentang KB.....	67
- Dua Anak Cukup Laki Perempuan Sama Saja.....	70
- Banyak Anak Banyak Rejeki.....	71
- Alasan Mengikuti atau Tidak Mengikuti KB.....	71

- Ukuran Keluarga Ideal	73
Profil Subyek Penelitian	73
BAB VI PEMBAHASAN.....	78
Proses-Proses Sosial Yang Menandai Hegemoni Kyai	78
-Kekuasaan Hegemonik Kyai	80
Komponen-Komponen Yang Diterima Secara Hegemonik dan Ditolak	84
BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS.....	90
simpulan.....	90
Implikasi Teoritis.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	HALAMAN
01. Pencapaian Akseptor Aktif Per Mix Kontrasepsi Kabupaten Maros, Januari 2000	52
02. Pencapaian Akseptor Baru Per Mix Kontrasepsi Kabupaten Maros, Januari 2000	52

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perempuan Islam---terutama dalam merespon keluarga berencana dan dominasi kyai terhadap perempuan Islam . Permasalahan dan tujuan utama penelitian ini didasarkan pada adanya keinginan untuk memahami respon perempuan Islam terhadap keluarga berencana dan komponen-komponen yang mereka terima atau tolak.

Penelitian ini termasuk dalam studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah salah satu pesantren yang ada di kota Maros yaitu Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Data dikoleksi dengan menggunakan 3 macam teknik koleksi data: dokumentasi (studi pustaka), observasi dan wawancara mendalam. Dengan menentukan jumlah subyek yang diwawancarai, penelitian ini menggunakan teknik *'snow ball sampling'* atau bola salju'. Dengan demikian, jumlah subyek ditentukan berdasarkan kecukupan data atau kejenuhan data dan tidak berdasarkan banyaknya subyek.

Untuk keperluan analisis data, digunakan beberapa konsep yang relevan dengan penelitian ini yaitu keluarga berencana, konsep ideologi dan teori hegemoni Gramsci. Teori ini terutama digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni kyai berlangsung melalui *consensio*, seperti dinyatakan oleh Gramsci. Kyai berusaha mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat sehingga mereka dapat mengerti bahwa KB itu bertentangan dengan agama. Untuk mengatasi masalah yang timbul, kyai dengan menyitir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan itu membawa rezekinya sendiri

Berdasarkan pemahaman perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, dapat dibagi dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah mereka yang sepenuhnya menolak KB atau terhegemoni penuh. Kedua adalah mereka yang menolak sebagian KB atau teresistensi superfisial dan yang terakhir adalah mereka yang secara tegas menerima KB atau teresistensi riil. Berkaitan dengan kategori tersebut, sikap perempuan Islam akan KB dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain agama, budaya, sosial ekonomi, pendidikan dan pengalaman pribadi masing-masing individu.

ABSTRACT

This study discussed about Moslem women---particularly in responding family planning and *kyai* domination to the Moslem women. The problem and main purpose of this study was based on the need to understand the respond of Moslem women to the family planning and its components they accepted or rejected.

This study was included in qualitative study with case study approach. The location of the study was one of Moslem dormitories in Maros, Darul Istiqamah Moslem Dormitory. The data was collected using documentation (library studi), abservation and depth interview. Determining the number of subjects was determined based on the data coverage and not based on the number of subjects.

For analyzing the data, it was used some relevant concepts with this study, they were family planning, ideology concept and Gramsci hegemony theory. This theory was particularly used to explain the phenomenon found this study.

The result of the study showed that the *kyai* hegemony went through *consensio*, as stated by Gramsci. *Kyai* tried to change the attitude and behavior of society in order they could understand that family planning was against the religion. To solve the problem, *kyai* by refering to Al-Quran articles concerning with the aim of marriage stated the every child born brought his/her own subsistence.

Based on the understanding of Moslem women at Darul Itiqamah Moslem Dormitory, it could be devided into three categories. First category was the women who fully rejected family planning or fully hegemony. Second category was the women who rejected partly of family planning or superficial resistance and the last category was the women accepted fully of family planning or real resistance. Relating with these categories, the attitude of Moslem women about family planning was influenced by any factors, such as religion, culture, social economics, education and experience of personal each individual.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini secara berturut-turut dibicarakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Latar Belakang Masalah

Pola hubungan sosial yang mementingkan "sikap konformitas terhadap yang mayoritas", merupakan salah satu alat ampuh yang khas Indonesia.¹ Alat ini dapat menggiring orang untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin (kyai). Ini adalah suatu bentuk lain dari pemaksaan yang sangat tidak kentara, akan tetapi mempunyai konsekuensi mental maupun sosial yang besar.

Paksaan yang dirasakan melalui tekanan sosial, tidak saja membuat orang yang semula mau menjadi tidak mau, tetapi juga dapat membuat orang meninggalkan cara keluarga berencana yang sebenarnya telah cocok buat mereka. Tindakan ini diambil semata-mata untuk "mengikuti" apa yang telah dianjurkan oleh pemimpinnya (kyai).

Dari asumsi tersebut dapat dikaji bagaimana kyai memaksakan kehendaknya agar masyarakat bersedia mengikuti apa yang telah digariskan oleh kyai dan bagaimana masyarakat merespons dominasi kyai.

¹ V.Hull dan T.Hull, "Politics, Culture and Fertility: Transition in Indonesia", *Makalah*, dalam John Caldwell Seminar: The Continuing Demographic Transition, (Canberra: August, 14-17, 1995).

Dengan demikian penolakan terhadap KB pada hakekatnya merupakan bentuk intervensi kyai kepada masyarakat, yang mencerminkan kekuasaan kyai, dimana masyarakat diletakkan pada posisi yang harus menerima ide kyai tentang penolakan terhadap KB tersebut. Pada akhirnya kyai dengan segenap jajarannya mampu 'menggiring' kesadaran masyarakat untuk menolak ide KB tersebut.

Setidaknya dalam melembagakan penolakan terhadap KB kyai menggunakan saluran interpersonal. Dengan memanfaatkan media pengajian dan menyitir ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan penolakan terhadap KB untuk lebih meyakinkan kepada warganya khususnya perempuan-perempuan yang telah berkeluarga.

Di samping menghadapi tekanan dari kyai, para perempuan masih lagi merasa berkewajiban meminta izin pada suami. Adanya keyakinan yang dimiliki subyek bahwa istri "wajib minta izin pada suami" ini berlaku tidak hanya pada saat hendak mengikuti atau tidak mengikuti keluarga berencana, tetapi juga dalam menentukan cara kontrasepsi apa yang hendak dipakai maupun kapan dan berapa lama hendak berhenti atau istirahat dulu.

Alasan utama sehingga para istri tidak mengikuti keluarga berencana karena alasan keluarga berencana dianggap melanggar norma agama dan menyalahi aturan perkawinan. Seperti pengalaman seorang perempuan di Maccopa, dia sebenarnya sudah merasa kewalahan sejak anak kelimanya lahir yang mengalami keterbelakangan mental dan ingin ikut keluarga berencana. Tetapi dirinya merasa melanggar "kepatuhan" pada peraturan yang ada. Akhirnya

dia menggunakan cara tradisional, dengan meminum ramuan yang terbuat dari rebusan air daun sirih diminum setiap kali mendapat menstruasi.

Berdasarkan penuturan mereka, diperoleh gambaran dalam proses pengambilan keputusan untuk mengikuti program keluarga berencana, ada beberapa faktor yang demikian berpengaruh. Selain faktor ekonomi yang demikian berat mereka rasakan, ada beberapa faktor lain "di luar dirinya" yang sangat berpengaruh. Adapun faktor lain tersebut sangat kuat pengaruhnya dalam menentukan kesediaan mereka untuk menggunakan metode kontrasepsi. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut adalah berbagai bentuk paksaan secara sistematis yang dibangun sebagai konsekuensi dari berlakunya konsep "population control", kepatuhan pada suami yang mencerminkan adanya hubungan gender yang tidak simetris dan kepatuhan terhadap saran orang lain (kyai).

Sejak diluncurkan kebijakan keluarga berencana, telah banyak penelitian yang dilakukan baik oleh kalangan pelaksana maupun kalangan perguruan tinggi. Penelitian yang telah dilakukan tersebut sebagian besar terkait dengan hal teknis. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Omas Bulan Rajagukguk dalam penelitiannya menegaskan bahwa faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemilihan alat kontrasepsi di Indonesia. Selain itu adanya akses pada metode kontrasepsi memungkinkan presentase perempuan lebih tinggi lagi untuk melakukan pemilihan metode kontrasepsi.²

² Omas Bulan Rajagukguk, "Contraceptive Choice in Indonesia: 1987 and 1991", *Asia Pacific Population Journal*, Vol.13 No. 1, March 1998.

Penelitian yang bersifat teknis dilakukan oleh Sparinga,dkk (1988) yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara praktek keluarga berencana dan pasangan usia subur muda dengan pasangan usia subur secara umum. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa praktek keluarga berencana di dua kalangan tidak jauh berbeda.³

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnilarso (1992) bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang dimensi-dimensi kesejahteraan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan metode etnografi disamping metode wawancara, peneliti berusaha menggali tujuh dimensi kesejahteraan keluarga, yaitu dimensi ekonomi, sosial budaya, kemandirian, agama, kesehatan, psikologi dan pendidikan. Peneliti melaporkan temuan-temuan yang intinya bahwa masyarakat mempunyai penilaian sendiri tentang keluarga yang dianggap sejahtera. Masyarakat memaknai "*tentrem ayem*", misalnya dari segi ekonomi, walaupun suami sebagai penyangga kehidupan keluarga tidak dapat menutup kebutuhan keluarga bukanlah merupakan persoalan yang utama.⁴

I.B.Wirawan dan Bagong Suyanto (1991) dalam penelitiannya sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kaum perempuan dalam pemilihan alat kontrasepsi dan penerimaan norma keluarga kecil menghasilkan temuan bahwa variabel demografis dan variabel sosial psikologis mempengaruhi wanita dalam pemilihan alat kontrasepsi selain variabel yang berkaitan dengan pengaruh norma

3. Daniel T. Sparinga,dkk. "Praktek Keluarga Berencana di Lingkungan Pasangan Usia Subur Muda di Daerah Perkotaan", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1988).

4. Yusnilarso, "Dimensi-Dimensi Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah", *Laporan Hasil Penelitian*, (Semarang: BKKBN dan PPSK UNDIP, 1992).

kelompok dan dinamika interaksi di antara pasangan suami istri dan mengenai keluarga kecil, sebagian besar responden memiliki anak hanya 1-2 orang, akan tetapi dalam persepsi mereka sesungguhnya masih menginginkan anak dalam jumlah yang relatif lebih banyak (4 orang).⁵

Moerdjati (1993) meneliti tentang sumber informasi utama perempuan pedesaan untuk memperoleh informasi tentang keluarga berencana dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ternyata sumber informasi utama yang digunakan untuk memperoleh informasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak adalah berupa saluran atau hubungan interpersonal.⁶

Dalam penelitian yang dilakukan Adrina,dkk di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam buku Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung ditemukan gambaran tentang kebijakan dan strategi-strategi pelaksanaan program keluarga berencana, kita bisa melihat betapa kecilnya kemungkinan perempuan untuk menolak pembatasan kelahiran, karena secara nasional tubuh mereka dijadikan target bagi keberhasilan program keluarga berencana. Mobilisasi massal melalui program safari keluarga berencana pada tahun 1980-an misalnya, menjadi pengalaman yang traumatis bagi semua perempuan berusia subur di tempat itu. Meskipun pengkeluarga berencana model itu sudah surut belakangan ini, tapi sosialisasi gagasan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera pada penduduk setempat

5. I.B. Wirawan dan Bagong Suyanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Kaum Wanita Dalam Kegiatan KB", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: BKKBN dan FISIP UNAIR, 1991).

6. Sri Moerdjati, "Sumber Informasi Utama Wanita Pedesaan Untuk Memperoleh Informasi Tentang Keluarga Berencana", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1993).

telah menghasilkan sikap-sikap tertentu di kalangan masyarakatnya berupa tekanan-tekanan sosial terhadap diri perempuan yang enggan ikut keluarga berencana. Melalui cara-cara tidak langsung seperti mereka dibuat malu, risih, tidak enak hati, dan sebagainya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh WHO pada 5.322 perempuan yang telah mempunyai anak di 14 kelompok budaya di negara berkembang menunjukkan bahwa perempuan berhenti menggunakan kontrasepsi IUD, oral dan suntik karena mereka tidak dapat menerima perubahan pola menstruasi. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa metode kontrasepsi yang disukai harus memenuhi ciri-ciri: (1) tidak menyebabkan amenore, (2) tidak mengubah volume darah yang keluar, (3) menjamin bahwa pendarahan singkat dan teratur, (4) memungkinkan perempuan mengetahui kapan mereka menstruasi, dan (5) tidak mengubah konsistensi maupun warna darah menstruasi.⁸

Pendapat suami mengenai keluarga berencana cukup kuat pengaruhnya untuk menentukan penggunaan metode keluarga berencana oleh istri. Pada penelitian di lima kota di Indonesia, persetujuan suami merupakan faktor penting dalam menentukan apakah istri akan menggunakan kontrasepsi atau tidak, karena suami suami dipandang sebagai pelindung, pencari nafkah keluarga dan pembuat keputusan.⁹

7. Adrina, dkk, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 82.

8. Marge Koblinsky, eds, *Kesehatan Wanita: Sebuah Perspektif Global*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1997), h. 156.

9. Ibid, h. 158.

Kajian yang selama ini dilakukan terhadap program keluarga berencana lebih mengarah kepada masalah seperti menurunnya angka kelahiran dan alat kontrasepsi yang digunakan oleh Masri Singarimbun yang dipublikasikan tahun 1996 dengan mengambil judul *Penduduk dan Perubahan*. Kesimpulan yang diambil diantaranya adalah bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran yang cukup besar dan penerimaan kontrasepsi dan jenis-jenisnya terdapat keragaman yang mencolok antar daerah, namun secara keseluruhan hasil yang dicapai adalah memuaskan.¹⁰

Pramutanto (1990) dengan penelitiannya tentang hambatan-hambatan KB di pedesaan menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola elit-massa di pedesaan. Akibatnya muncul konfigurasi kekuatan politik yang lebih pluralistik. Kekuatan birokrasi sebagai institusi yang menerapkan kebijakan dihadapkan pada konfigurasi kekuatan politik lokal yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program KB. Hambatan-hambatan tersebut bersifat ideologis politis dan teknis administratif. Selain itu juga terdapat hambatan dalam kemampuan mengorganisasikan masyarakat.¹¹

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas lebih banyak memandang program keluarga berencana sebagai suatu kebijakan yang harus diikuti oleh masyarakat. Sebagian besar memfokuskan pada kajian-kajian yang mengabaikan aspek-aspek sosial politik.

10. Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 27.

11. Wisnu Pramutanto, "Hambatan-Hambatan Pelaksanaan KB di Pedesaan: Telaah Hubungan Elit-Massa di Tingkat Lokal; Studi Kasus Kecamatan Rawan Gresik", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1990).

hegemonikyai dalam pemilihan alat kontrasepsi. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan kajian dan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

Sistematika Tesis

Untuk memberikan gambaran secara umum, pada bab pertama ini dicantumkan sistematika tesis. Tesis ini terdiri atas enam bab. *Bab pertama* menguraikan hal-hal yang melatar belakangi studi, rumusan masalah dan tujuan masalah serta manfaat studi. Pada *bab kedua* diuraikan beberapa konsep yang digunakan dalam studi ini: keluarga berencana, konsep ideologi serta teori yang dianggap relevan untuk analisis studi ini: teori hegemoni Gramsci. *Bab ketiga* memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang menyangkut lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada *bab keempat* dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, *bab lima* memaparkan tentang hasil temuan di lapangan dan *bab enam* menguraikan tentang pembahasan. Akhirnya pada *bab tujuh* disampaikan simpulan dan implikasi teoritis. Ruang implikasi teoritis tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menempatkan hasil studi ini pada posisi teori yang relevan dengan dukungan studi-studi lain yang terkait dengan studi ini.

Tidak seperti penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan difokuskan dominasi kyai terhadap perempuan Islam dalam pemilihan alat kontrasepsi dengan perspektif hegemoni kyai. Dengan kata lain, penelitian ini hendak berusaha memahami bagaimana kyai dengan posisi yang dominan mensosialisasikan program keluarga berencana di satu sisi, dan di sisi lain adalah bagaimana perempuan Islam memahami program keluarga berencana tersebut.

Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah merespon keluarga berencana ?
2. Komponen-komponen manakah yang ditolak dan mana pula yang diterima?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh deskripsi tentang bagaimana perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah dalam merespon keluarga berencana.
2. Untuk mengetahui komponen-komponen manakah yang ditolak dan mana yang diterima.

Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbincangan teoritik di bidang ilmu sosial politik, khususnya tentang

BAB II

KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN

Pada bab ini secara berturut-turut diuraikan beberapa konsep yang digunakan dalam studi ini yang meliputi keluarga berencana, konsep ideologi serta teori yang relevan untuk menganalisis data studi yang berupa teori hegemoni Gramsci.

Keluarga Berencana

Model pembangunan yang digunakan dengan penekanan pada sektor ekonomi tampaknya merupakan faktor penentu utama bagi negara dalam merumuskan kebijakan KB. Kebijakan KB untuk mengendalikan jumlah penduduk berawal dari pergeseran kebijakan atau kecenderungan *pro-natalist* pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ke kebijakan *anti-natalist* pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang terjadi sekitar tahun 1970-an. Pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai tertarik pada Amerika Serikat sebagai negara adikuasa “barat”. Melalui duta besarnya di Jakarta yaitu Marshall Green, AS berusaha mempengaruhi Presiden Soeharto untuk menerima program KB.

Pegeseran kebijakan dari *pro-natalist* menjadi *anti-natalist*, yang kemudian juga mengantarkan Presiden Soeharto untuk menerima penawaran tersebut, pada hakekatnya tidak terlepas dari strategi pertumbuhan ekonomi Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa kebijakan kependudukan berupa pengendalian jumlah penduduk mutlak diperlukan demi kesehatan ekonomi. Hal

ini antara lain ditegaskan dalam ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 sebagai berikut.

Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembanguana menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang'.¹²

Di samping itu, kemauan politis dalam menanggulangi masalah kependudukan ditandai dengan ikut sertanya Presiden Soeharto dalam menandatangani Deklarasi Kependudukan tahun 1967. Kemudian sejak 1970 program KB secara resmi menjadi sebuah kebijakan kependudukan yang eksplisit untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan deklarasi tersebut, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya "Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya" menyatakan sebagai berikut.

...Dengan itu secara resmi kita mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia, dan pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai perencanaan ekonomi dan sosial

Dalam kaitannya dengan keluarga berencana tersebut, Presiden Soeharto (1989) dalam otobiografinya juga menyatakan sebagai berikut.

Kelahiran perlu kita kendalikan melalui peningkatan dan perluasan program nasional Keluarga Berencana. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang terpenting yang harus ditangani bersama oleh seluruh masyarakat, oleh pria dan wanita, dengan bijaksana dan sungguh-sungguh. Jika hal ini sampai lepas dari kendali kita, ia akan menghabiskan hasil pembangunan yang kita usahakan dengan susah payah.¹³

12. BKKBN, *Informasi Dasar Kependudukan Keluarga Berencana 1979*, (Jakarta: BKKBN, 1979), h. 21.

13. BKKBN, *Dua Dasa Warsa Gerakan KB Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 1990), h. 5-6.

Dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah memusatkan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi fokus pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu pemerintah juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah kependudukan.¹⁴ Walaupun alasan utama diambilnya keputusan program KB oleh pemerintah adalah karena pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan dan cepatnya laju pertumbuhan penduduk, namun dalam memperkenalkan kepada masyarakat, utamanya pada awal pelaksanaan program dilakukan secara hati-hati, karena masalahnya menyangkut masalah moral, budaya dan agama, serta terbatasnya sumber yang tersedia. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk 'menyembunyikan' alasan pengendalian kependudukan karena faktor ekonomi dan menggantikannya dengan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah pada awalnya hanya memberikan stimulan atau dorongan untuk menciptakan iklim yang lebih baik untuk menanamkan pengertian KB. Setelah dianggap tidak ada hambatan yang mendasar dari masyarakat, maka ditetapkanlah program KB pada tahun 1970 menjadi program nasional dan menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional.¹⁵ Pengenalan dan pelaksanaan program KB di Indonesia berjalan sesuai dengan tingkat keterbukaan dan penerimaan masyarakat. Awalnya program KB diperkenalkan dengan alasan kesehatan, sebab apabila langsung menggunakan alasan pembatasan kelahiran

14. *Idem*, h. 5-6.

15. BKKBN, *Informasi Gerakan KB Nasional Selama P.I.P I*, (Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN, 1994), h. 10.

atau pengurangan tekanan penduduk, bisa jadi hal ini menjadi tantangan dari masyarakat.

Tujuan Kebijakan KB

Tujuan ideal gerakan KB adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan ini akan dicapai melalui sosialisasi dan institusionalisasi Norma-norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Tujuan kebijakan KB setiap kurun waktu mengalami perubahan penekanan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Secara garis besar perkembangan program KB dibagi dalam tiga kurun waktu, kurun waktu pertama 1970 s/d 1980, kurun waktu 1981 s/d 1990 dan kurun waktu 1991 s/d sekarang. Dalam kurun waktu pertama kebijakan KB masih dalam bentuk program KB, yang bertujuan , yang bertujuan membentuk Norma Keluarga Kecil (NKK), di mana dalam satu keluarga idealnya berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari ayah, ibu dan tiga orang anak (*Puncawarga*). Pada kurun waktu kedua, program KB dirubah menjadi Gerakan KB Nasional (GKBN), yang bertujuan membentuk NKKBS dengan jumlah keluarga lebih dibatasi yaitu setiap keluarga diharapkan hanya memiliki 2 anak atau setiap keluarga terdiri dari 4 orang yaitu ayah, ibu dan dua orang anak (*Caturwarga*). Sedangkan kurun waktu ketiga ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.¹⁶

Tujuan program KB tiap-tiap Pelita sebagaimana dijelaskan dalam buku Informasi Gerakan KB Nasional Selama PJP I, mengalami penekanan yang

16. Hasil wawancara dengan Pegawai BKKBN Kanwil Prop. Sul-Sel, tahun 1999.

berbeda-beda.¹⁷ Keluarga berencana dalam rancangan Pelita I dimasukkan dalam sektor kesehatan. Pada saat itu, ketika rancangan Pelita I disiapkan, program KB masih merupakan program nasional yang dikelola oleh komite dengan dukungan dana perlindungan penuh melalui lembaga nasional. Sedangkan pada tahun kedua Pelita I, pelaksanaan KB sepenuhnya sudah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Secara geografis, sasaran program KB pada Pelita I masih terbatas di wilayah Jawa dan Bali.

Pada Pelita II, pemerintah mulai memperkenalkan tujuan demografis program KB yaitu untuk menurunkan tingkat fertilitas. Dengan program KB ini diperkirakan tingkat fertilitas dapat menurun 50% pada tahun 1990 dibanding keadaan tahun 1971. Konsekuensi dari rencana tersebut adalah diterapkannya sistem target yang sangat ketat dalam pencapaian jumlah peserta KB.

Pada Pelita III, program kependudukan mulai ditonjolkan secara jelas. Tujuan jangka panjang Pelita III adalah penurunan angka fertilitas, peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka mortalitas. Sedangkan pada Pelita IV, program KB mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1). Menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka mortalitas khususnya bayi dan anak.
- 2). Meningkatkan jumlah peserta KB baru dan memantapkan partisipasi dalam program KB untuk menjangkau seluruh strata sosial.

17. BKKBN, *Informasi Gerakan ...*, h. 5.

- 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kependudukan dalam rangka mewujudkan penerimaan NKKBS.
- 4). Meningkatkan kesadaran, peranan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat serta manajemen program KB.
- 5). Mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka melembagakan nilai-nilai keluarga kecil.

Gerakan KB pada Pelita V mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1). Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
- 2). Menurunkan angka kelahiran baik secara langsung melalui program KB , maupun tidak langsung dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat. Kebijakan ini juga disertai dengan kebijakan untuk meningkatkan usia perkawinan dan menunda anak pertama.
- 3). Menurunkan angka mortalitas khususnya bayi, anak-anak dan ibu serta untuk meningkatkan kesehatan lingkungan.
- 4). Meningkatkan kualitas penduduk dengan meningkatkan standar kesehatan dan gizi penduduk dan juga untuk meningkatkan pendidikan.

Pada dasarnya tujuan Gerakan KB Nasional sebagaimana telah diuraikan di atas dari Pelita I sampai dengan Pelita V, mencakup dua hal yaitu tujuan kualitatif dan tujuan kuantitatif. Tujuan kualitatif adalah menciptakan atau mewujudkan NKKBS sedangkan tujuan kuantitatif adalah menurunkan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Menurut Haryono Suyono, tujuan program KB nasional adalah turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi seluruh lapisan masyarakat melalui usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Untuk mencapai tujuan itu ditempuh dua pendekatan yang integral yaitu: 1) melalui penurunan tingkat kelahiran secara langsung dengan menggunakan alat kontrasepsi; dan 2) melalui penurunan secara tidak langsung dengan pelembagaan ide KB.¹⁸

Sejalan dengan tujuan-tujuan kebijakan KB yang telah disebutkan di atas, dalam Informasi Dasar KB secara singkat disebutkan bahwa tujuan program kependudukan KB adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia. Dengan mewujudkan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera ini diharapkan akan terbentuk pola tingkah laku fertilitas di tiap-tiap keluarga yang menguntungkan bagi pengendalian jumlah kelahiran masyarakat Indonesia.¹⁹

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka penggarapan KB diarahkan pada dua bentuk sasaran yakni : sasaran langsung dan tidaklangsung.

Sasaran langsung program KB adalah pasangan usia subur. Pasangan usia subur ini secara bertahap diajak untuk menjadi peserta KB yang aktif lestari sehingga memberikan efek langsung penurunan fertilitas. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah organisasi-organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses pembentukan sistem

¹⁸ Hadi Wiyono, "Jalan Panjang Menuju Keluarga Kecil Yang Sejahtera", *Warta Demografi*, Th. ke. 25 No. 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), h. 8.

¹⁹ *Idem*, h. 21.

nilai di kalangan masyarakat, yang dapat mendukung usaha pelebagaan NKKBS.

Keluarga sejahtera dirumuskan dalam UU No. 10/1992 sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang agar antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga, kecil, bahagia dan sejahtera.²⁰ Filosofi tentang NKKBS juga dapat dipahami melalui fungsi-fungsi tertentu yang harus diperankan oleh keluarga. Paling tidak terdapat delapan fungsi keluarga yang harus diperankan oleh keluarga bahagia dan sejahtera. Adapun kedelapan fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih dalam keluarga, perlindungan/proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.²¹

Di samping institusi-institusi masyarakat, institusi/tokoh agama juga mendapat perhatian yang sangat besar. Sejak awal program KB, lembaga/tokoh agama ini diminta oleh pemerintah untuk ikut membantu mensosialisasikan program KB. Pada awal pencanangan program KB, dikalangan tokoh agama masih banyak yang tidak menyetujui KB terutama dalam hubungannya dengan

²⁰ Kantor Menteri Negara dan Kependudukan/BKKBN, *25 Tahun Gerakan KB*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 106.

²¹ Yaumul A. Achir, "Pembangunan Keluarga Sejahtera Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", dalam *Prisma*, No. 6, (Jakarta: LP3ES, 1996).

penggunaan IUD. Menghadapi ketidaksetujuan tokoh agama tersebut, maka pemerintah dalam hal ini BKKBN bekerjasama dengan Departemen Agama baik di tingkat pusat maupun daerah lebih mengencangkan lagi berbagai kegiatan untuk mendapatkan dukungan dari pemuka-pemuka masyarakat khususnya tokoh-tokoh agama Islam. Penyampaian penerangan dan motivasi KB melalui berbagai jalur yang strategis, seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam, ceramah-ceramah agama dan jalur-jalur lainnya senantiasa dilaksanakan. Buku-buku, brosur-brosur dan media cetak lainnya disebarluaskan kepada pemuka-pemuka agama.²²

Meskipun telah melibatkan sejumlah tokoh Islam, kendala-kendala bersifat keagamaan masih ada, oleh karena itu untuk menetralkan resistensi-resistensi kultural keagamaan, pemerintah merancang suatu pendekatan yang lebih khusus, sistematis dan terpadu. Dengan melibatkan berbagai tokoh agama dan lembaga keagamaan pemerintah berusaha untuk, 1) menghilangkan kesalahpahaman tentang makna pembangunan kependudukan dan khususnya KB; 2) memberikan penerangan bahwa program KB tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang terjadi pada awal 1970-an hingga awal 1980-an adalah proses transformasi kesadaran dan pemahaman tentang KB di kalangan para pemuka agama. Hal ini antara lain tampak pada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang masalah kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tahun 1983. MUI berhasil melahirkan sejumlah

²² BKKBN, *Dua Dasawatah*, h. 47.

pikiran yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kependudukan pada umumnya dan KB pada khususnya. Keputusan Munas yang berkaitan dengan KB antara lain berbunyi sebagai berikut :

Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan saleh. Pelaksanaan program KB termasuk komunikasi, informasi dan edukasi hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat serta ditempuh dengan cara yang bersifat insani.

Pelaksanaan KB hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami istri.

Penggunaan kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis/paramedis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain. Melakukan usaha vasektomi dan tubektomi bertentangan dengan hukum Islam (haram).²³

Pemahaman tokoh agama dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang drastis. Pada tahun 1989 NU melalui muktamarnya di Yogyakarta menyatakan persetujuannya serta mendukung pelaksanaan kontrasepsi mantap (kontap) dengan dasar adanya keberhasilan pelaksanaan rekanalisis. Keberhasilan rekanalisis kontap tersebut dipandang bukan merupakan pemandulan abadi. Peristiwa berikutnya yang dapat memberikan peluang besar dalam penggarapan KB adalah adanya kesepakatan peserta Seminar Nasional tentang Peningkatan Peran Ulama dalam Gerakan KB Nasional pada tanggal 17-19 Februari 1990 di Jakarta. Keputusan dari

²³ Idem, h. 49

kesepakatan peserta seminar nasional itu telah menandakan kebulatan tekad para ulama untuk mendukung serta aktif dalam menangani masalah-masalah KB dan kependudukan. Forum itu sekaligus melegalisasi atas penggunaan kontak dalam pelayanan KB.²⁴

Agar terjadi persamaan pemahaman tentang KB pemerintah, institusi masyarakat dan institusi keagamaan seringkali membuat kesepakatan bersama. Hal ini dimaksudkan supaya informasi atau pesan-pesan tentang program yang disampaikan kepada masyarakat dapat sama. Setelah terjadi kesepakatan, secara bersama-sama lembaga-lembaga ini mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar bersedia mengikuti KB. Dengan kata lain lembaga-lembaga tersebut dengan pembenaran-pembenaran yang digunakan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk menyetujui dan berperan serta terhadap KB.

Lembaga-lembaga pembentuk kognisi tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan KKBS menggunakan dua saluran yaitu saluran interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal melibatkan tatap muka sumber dan penerima antara dua orang atau lebih, seperti rapat, pertemuan kelompok dan percakapan langsung. Sedangkan media massa yang digunakan diantaranya adalah radio, televisi, film, surat kabar dan pamflet. Sejak awal pelaksanaan kebijakan KB dapat dikatakan hampir semua saluran media massa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan KB. Di radio misalnya ada acara khusus yang menyiarkan masalah KKBS. Di televisi juga menayangkan iklan tentang KB serta pamflet-pamflet yang begitu banyak beredar di masyarakat. Di

²⁴ *Ibidem*, h. 52.

samping itu dalam pelebagaan KB juga memanfaatkan papan reklame dan tugu yang melambangkan bentuk keluarga kecil.

Dengan propaganda melalui media-media tersebut, negara dengan bantuan lembaga pembentuk kognisi masyarakat, bermaksud mengubah nilai atau pola pikir warga masyarakat agar dapat menerima nilai keluarga kecil yang kemudian diikuti dengan perilaku mengikuti KB. Sedangkan pendekatan media interpersonal juga terus berjalan untuk meyakinkan warga akan KKBS. Dalam hal ini, pemimpin informal utamanya kyai, dititipi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan KKBS, misalnya pada saat menyampaikan pengajian. Media seperti ini ternyata tidak efektif, terlebih di daerah santri khususnya di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, dimana secara umum masyarakatnya masih mempunyai rasa kepatuhan yang tinggi terhadap kepemimpinan kyai.

Menurut Wirosuharjo,²⁵ "paksaan dalam arti bahwa mereka yang tidak ber-KB akan dihukum, hanya semacam *social control*". Pada masyarakat bawah ada semacam anggapan bahwa bila tidak melaksanakan perintah pimpinan berarti tidak taat berarti (berlaku) tidak baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 'pemaksaan' dalam pelaksanaan KB telah ditekankan pada tindakan persuasif.

Dengan pendekatan dan cara yang dilakukan pemerintah dalam hal KB sebagaimana telah dijelaskan di atas, masyarakat dikonstruksi untuk menerima ide KKBS. Sehingga secara sadar maupun tidak, ide atau nilai tentang keluarga kecil itu tertanam dalam pikiran masyarakat yang pada akhirnya akan diikuti dengan perilaku warga masyarakat untuk menjadikan keluarga kecil sebagai cara

²⁵ Hadi Wiyono, "Jalan Panjang ...).

hidup. Masyarakat akhirnya secara sukarela akan mendukung dan membenarkan program pemerintah tentang KB, walaupun tidak sepenuhnya menguntungkan mereka. Persetujuan masyarakat akan program KB dalam konteks tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat hegemoni negara. Hegemoni negara sebagaimana dikemukakan Gramsci²⁶, merujuk pada bentuk-bentuk tanpa kekerasan melalui kontrol secara keseluruhan batasan yang dominan dari lembaga-lembaga budaya dan sosial, sekolah, museum, partai politik, praktek keagamaan, bentuk arsitektur dan media massa.

Walaupun cara yang dilakukan pemimpin/kyai tampaknya tidak terdapat pemaksaan dalam penolakan KB, namun sebenarnya telah terjadi 'pemaksaan' hanya dalam bentuk yang lain yaitu penekanan terhadap pola pikir atau melakukan pemaksaan secara halus, yang bisa disebut sebagai kekuasaan hegemonik. Namun disisi lain, yaitu dari sisi masyarakat, ternyata tidak seluruhnya dapat terkonstruksi sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin/kyai. Dalam menghadapi hegemonisasi kyai tersebut setidaknya melahirkan kategorisasi warga masyarakat (perempuan Islam) yaitu yang terhegemoni penuh, terhegemoni tidak penuh (resistensi superfisial) dan yang tidak terhegemoni sama sekali (resistensi riil).

Konsep Ideologi

Ideologi dapat dipahami secara positif dan dapat dipahami secara negatif. Dalam pengertian positif, ideologi berkenaan dengan sistem pendapat,

²⁶ Timothy Mitchell, *Everyday Metaphors of Power*, (New York: Department of Politics, New York University, 1990), h. 553.

nilai dan pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu dengan nilai kognitif yang bervariasi.²⁷ Ideologi juga diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Ideologi tampak sebagai penjelmaan suatu hasil konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan kepentingan.²⁸ Sistem nilai atau kepercayaan itu diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh sekelompok tertentu sebagai pegangan untuk menyaring arus informasi yang diterima.²⁹

Sementara itu, dalam pengertian yang negatif, ideologi dipahami sebagai konsep kritis yang berarti bentuk kesadaran palsu atau kebutuhan untuk penipuan, maksudnya bagaimana memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial, nilai kognitif dari ide-ide yang dipengaruhi oleh ideologi.³⁰ Dalam hal ini ideologi mempunyai peran penting dan merupakan kekuatan yang akar-akarnya tertanam di dalam macam-macam lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakkan sistem sikap dan nilai yang mendukung.³¹ Ia sering digunakan untuk melindungi kepentingan elite-elite kepercayaan yang ditentukan secara sosial, bahkan sering digunakan untuk memelihara status quo (kemapanan) atau sebagai pembenaran dari tindakan-tindakan yang ingin mengubah status

²⁷ Jorge Larraín, *Konsep Ideologi*, (Yogyakarta: LKP3M, 1997), h. 199.

²⁸ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1992), h. 187.

²⁹ Lyman Tower Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986), h. 3 & 5.

³⁰ Larraín, *Konsep*..., h. 2.

³¹ Utami, *Pria/Wanita*..., h. 42.

quo.³² Memang ideologi memainkan peran tepat dalam menyembunyikan hubungan antar kelas yang sebenarnya dengan menerangkan hubungan dominasi dan subordinasi. Dengan begitu, hubungan-hubungan sosial tampak harmonis dan individu-individu melaksanakan praktek-praktek reproduktif mereka tanpa perpecahan sehingga dapat mengesahkan struktur dominasi.³³

Mengingat besarnya pengaruh ideologi pada kehidupan manusia dan memungkinkan kita menganalisis interaksi antara sistem politik dan lingkungannya yaitu antara para elite dan tingkah laku massa rakyat, studi ini berusaha mengungkap ideologi yang digunakan oleh pemimpin informal/kyai dalam berhadapan dengan masyarakat (perempuan Islam) sebagai lawan politiknya terutama dalam masalah KB. Teori yang digunakan dalam studi ini akan diuraikan di bawah ini.

Teori Hegemoni Gramsci

Teori hegemoni Gramsci dinilai sangat signifikan untuk diterapkan dalam analisis studi ini karena fenomena yang ada menunjukkan adanya dominasi kyai atas masyarakat (perempuan Islam) dalam masa yang cukup lama.

Dalam pandangan Gramsci, negara (dalam artian kyai) merupakan sebuah instrumen terpenting bagi ekspansi kekuatan kelas yang dominan dan sebuah kekuatan koersif yang membuat kelompok ter subordinat tetap lemah dan tidak terorganisasi sehingga kelas penguasa tetap dapat mempertahankan

³² Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), h. 62.

³³ Larrain, *Konsep...*, h. 47.

kekuasaannya.³⁴ Untuk tujuan itu negara sering menempuh dua cara, yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang kedua inilah yang disebut hegemoni.³⁵ Kepemimpinan moral dan filosofis, demikian Bocoock menyebutnya, merupakan kepemimpinan yang dicapai melalui persetujuan aktif dari kelompok-kelompok utama dalam masyarakat³⁶, yaitu persetujuan yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang ada dianggap sah.³⁷

Hegemoni menurut Kolakowski, merupakan pengendalian kehidupan intelektual masyarakat oleh sarana-sarana budaya, Water lebih lanjut menjelaskan bahwa hegemoni merupakan upaya kelompok-kelompok sosial untuk mengendalikan 'organisasi-organisasi privat' supaya pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma dapat dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri.³⁸

³⁴ Quintin Hoare & Geoffrey N. Smith, *Selections from the Prison of Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: International Publishers, 1992), h. 263.

³⁵ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemusiaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 74.

³⁶ Lihat Robert Bocoock, *Hegemony*, (London: Tavistock Publications Limited, 1986), h. 11.

³⁷ Hendarto, "Mengenal...", h. 81.

³⁸ Sebagaimana dikutip Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: SAGE Publications, 1994), h. 183.

Konsep hegemoni memang lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya sehingga upaya itu berhasil membentuk alam pikiran mereka. Pengaruh itu dimungkinkan karena manifestasi ideologi hegemonik berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Proses penafsiran itu memang berlangsung secara tersembunyi (tersamar), tetapi terjadi secara terus-menerus. Artinya secara sistematis ideologi hegemonik mencekoki orang banyak dengan pikiran-pikiran tertentu, doktrin tertentu, bias-bias tertentu, sistem-sistem preferensi tertentu, bahkan 'tuhan-tuhan' tertentu.³⁹

Kelompok dominan dalam suatu negara cenderung memaksakan visi hegemoni mereka melalui berbagai institusi seperti sekolah, media massa, agama dan berbagai praktek manusia sehari-hari sehingga hegemonik tidak hanya merasuk ke dataran ekonomi dan politik, tetapi juga budaya dan ideologi bahkan dimungkinkan lewat proses regimentasi yang meluas sampai ke alam bawah sadar masyarakat.⁴⁰ Akan tetapi, seberapa besar kekuatan kyai bergantung pada kedalaman proses kekuasaan bermain dalam wilayah publik dan dunia swasta dan juga bergantung kepada hegemoni yang mengalir dari relasi tarik menarik antara masyarakat madani dan sistem negara.⁴¹

³⁹ Lihat Idy Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), h. xv.

⁴⁰ *Idem*, h. xiii.

⁴¹ Lihat Michael van Langenberg, "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idy Subandi, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 224.

Walaupun hegemoni diperoleh melalui persetujuan dan penggunaan paksaan oleh satu kelas atas yang lainnya, persetujuan dalam proses hegemonik memainkan peran sangat penting. Bagi Gramsci, hegemoni adalah suatu bentuk kontrol dan kekuasaan yang penting. Dengan demikian, kekuasaan hegemonik lebih merupakan kekuasaan melalui 'persetujuan', yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.⁴²

Karena itu, Gramsci⁴³ selalu menghubungkan kekuasaan hegemonik ini dengan ungkapan-ungkapan psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio politis atau aspek-aspek aturan yang lain. Lebih jauh dijelaskan bahwa tidak semua individu tidak bisa memberikan persetujuan itu. Kepatuhan tidaklah bersifat otomatis, tetapi haruslah diciptakan secara aktif. Dalam hal ini, hegemoni mencapai kemenangan melalui penciptaan persetujuan langsung secara aktif sebagai hasil dari adopsi kepentingan rakyat oleh kelas hegemonik.

Untuk mewujudkan hal itu, bahasa dipandang sangat penting untuk membentuk kepemimpinan moral dan intelektual sehingga bahasa ditempatkan sebagai sarana yang melayani fungsi hegemoni. Gramsci menekankan bagaimana pentingnya konotasi halus yang dapat membekukan persepsi dan konsepsi sehingga memudahkan penerimaan asumsi konvensional dan menghalangi pernyataan tentang ide-ide yang bertentangan. Dalam konteks ini, Gramsci mengakui bahwa setiap budaya memperlihatkan dan mengendalikan sistem nilai dan pandangan umum dalam bahasanya.

⁴² Mansoer Fakih, *Masyarakat Sipil, Untuk Transformasi, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 56 - 57.

⁴³ Hendarto, *Mengenal ...*, h. 80-82.

Mengingat dominasi kelas merupakan sebuah kemenangan intelektual dan moral, menyatakan bahwa perjuangan perjuangan revolusioner akhirnya menjadi persoalan pendidikan; "setiap hubungan hegemoni perlu adanya hubungan pendidikan". Untuk itu menyukkseskan perjuangan revolusioner ini diperlukan peran kaum intelektual. Dalam pandangan Gramsci, seorang intelektual adalah "setiap orang yang fungsi sosialnya adalah bertindak sebagai penyampai gagasan ke dalam masyarakat madani dan antara pemerintah dengan masyarakat madani". Ada dua kategori intelektual yang berbeda: intelektual organik dan tradisional. Yang pertama mencakup mereka yang mampu mengelaborasi bidang politik dan filosofis untuk memberikan kesadaran kepada anggota masyarakatnya, sedangkan yang kedua mencakup mereka yang memegang monopoli bagi sejumlah pelayanan: ideologi religius, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa itu, bersama-sama dengan sekolah, pendidikan, moralitas, keadilan, kemurahan hati, kerja yang baik, dan sebagainya.⁴⁴

Kategori intelektual yang sangat erat kaitannya dengan konsep pendidikan Gramsci adalah "intelektual organik", Gramsci mendefinisikan intelektual organik sebagai intelektual yang secara organis berakar di dalam rakyat dan bagian dari rakyat yang mengakuinya. Gramsci menyatakan bahwa semua orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual dalam masyarakat. Setiap orang melaksanakan bentuk aktivitas intelektual: sebagai seorang filosof, seniman, perasa. Mereka berpartisipasi di dalam sebuah konsepsi tentang dunia, memiliki kesadaran tentang tanggung jawab

⁴⁴ Hoare dan Smith, *Selections ...*, h. 7 & 9.

moral, dan karena itu mereka menyumbang usaha membenarkan atau mengubah konsepsi tentang dunia, juga mendorong ke arah cara berpikir yang baru.

Memang dalam konteks perjuangan ideologi (perjuangan terhadap ideologi dominan), pendidikan adalah peran krusial intelektual organik dalam memunculkan kesadaran kritis. Bagi Gramsci, kesadaran kritis adalah hasil perjuangan ideologis yang dihasilkan oleh “opsir” intelektual dari kelas sosial yang bersaing.⁴⁵ Pentingnya peran intelektual yang organik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka berfungsi sebagai perantara di antara rakyat atau antara rezim dan rakyat serta berfungsi sebagai pemikir serta pengatur bagi kelompok mereka. Jika hubungan di antara mereka dijalin dalam sebuah kepaduan organik akan terjadi perubahan dari perasaan menjadi pemahaman dan pengetahuan. Jika hal itu dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka akan tercipta kekuatan sosial yang disebut *historical bloc*.⁴⁶ Kekuatan sosial inilah yang diharapkan mampu melakukan *counter hegemony* terhadap kekuatan dominan yang mampu menciptakan sejarah baru karena faktor penentu perubahan sosial terletak dalam masyarakat madani itu sendiri. Masyarakat madani menjadi kekuatan nyata yang telah mengubah sejarah umat manusia.

Memang pada saat-saat tertentu negara akan mengalami krisis hegemoni, yaitu ketika kelas yang memerintah telah kehilangan konsesusnya, sewaktu tidak lagi ada “kepemimpinan” tetapi hanya ada “dominasi” yang hanya menerapkan kekuatan koersif. Ini berarti bahwa massa yang besar jumlahnya telah tercerabut dari ideologi lama dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan pada apa yang

⁴⁵ Fakhri, *Masyarakat ...*, h. 65.

⁴⁶ Hoare dan Smith, *Selections ...*, h. 418.

biasanya mereka percayai.⁴⁷ Jika hal ini terjadi, akan terbuka jalan menuju transformasi revolusioner yang dapat meruntuhkan hegemoni kelas dominan. Dalam hal ini, perlu adanya usaha menemukan strategi yang tepat seperti yang dikonsepsikan Gramsci dengan strategi *war position* “perang posisi”- suatu bentuk perjuangan penetrasi ideologis yang berlangsung terutama dalam sistem kelembagaan melalui pengembangan kesadaran kritis.⁴⁸ *War of position* ini memerlukan perjuangan politik yang jauh lebih kompleks, sebuah bentuk perjuangan spesifik yang melibatkan elemen-elemen politik yang berusaha menang atas militer.⁴⁹ Konsep *war of position* ini didasarkan pada gagasan mengelilingi aparatur negara dengan suatu *counter hegemony* yang dibentuk bersama oleh organisasi massa sebagai basis pembentukan negara yang baru.⁵⁰ Memang *war of position* menunjuk pada sebuah strategi perlawanan untuk masa yang panjang.⁵¹

Dengan adanya kondisi yang seperti itu, dimungkinkan pula adanya masa transisi yang ditandai “melenyapnya negara”. Gramsci menggambarkan transisi ini secara bergantian sebagai “penyerapan kembali masyarakat politik ke dalam masyarakat madani” serta “menghilangnya masyarakat politik dan munculnya suatu masyarakat yang teratur”. Institusi dan struktur legal “masyarakat politik” yang koersif akan menghilang secara bertahap sementara

⁴⁷ Idem, h. 275 – 276.

⁴⁸ Hendarto, *Mengenal...*, h. 87.

⁴⁹ Christine Buci Glucksmann, *Gramsci and the State*, (London: Lawrence and Wishart, 1980), h. 25.

⁵⁰ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 173.

⁵¹ Buci Gluckmann, *Gramsci ...*, h. 252.

unsur-unsur masyarakat teratur (masyarakat madani) semakin nyata menunjukkan kemunculannya.⁵²

Konsep hegemoni (ideologi dominan), kekuasaan kyai dapat dianalogikan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan keluarga berencana. Kyai mengarahkan masyarakatnya (perempuan Islam) untuk mengikuti kehendaknya yaitu dengan mempropagandakan ide tentang keluarga berencana menyalahi ajaran agama dan tujuan perkawinan.

Dengan teori ini kami akan mencoba menelaah bagaimana kyai menggunakan seluruh jaringan dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada untuk mengubah kesadaran dan pola pikir masyarakat khususnya perempuan Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa terhadap pelaksanaan keluarga berencana.

⁵² Richard Bellamy, *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*. (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 202.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang menyangkut metode penelitian yang digunakan, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan dapat ditemukan gambaran dan pemahaman secara mendalam tentang obyek kajian/sasaran penelitian. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk secara induktif memperoleh sumber data alamiah yang bersifat holistik dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memahami pemahaman perempuan Islam tentang keluarga berencana.

Dimensi realitas yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini terdiri dari dimensi empirik dan dimensi simbolik. Dimensi empirik adalah untuk mengungkapkan variabel kebijakan keluarga berencana dan dimensi simbolik adalah untuk mengungkapkan variabel hegemoni kyai. Kedua variabel tersebut bersama akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat yang mempunyai dimensi empirik (seperti perubahan struktur, perilaku dan sikap keluarga akibat keluarga berencana) dan dimensi simbolik yaitu pemahaman perempuan Islam terhadap program keluarga berencana.

Yang dimaksud hegemoni kyai adalah segala usaha dan strategi yang dilakukan terhadap kebijakan keluarga berencana. Hegemoni kyai atas perempuan Islam dalam pelaksanaan keluarga berencana akan dikaji dari pernyataan-pernyataan kyai, peran lembaga-lembaga agama serta interpersonal. Di samping itu dari sisi perempuan Islam akan dikaji tentang motivasi, sikap dan perilaku yang mencerminkan pemahamannya terhadap keluarga berencana dan komponen-komponen mana yang mereka terima secara hegemonik dan komponen-komponen mana yang mereka tolak.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Pondok Pesantren Darul Istiqamah dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa pondok pesantren ini adalah: *Pertama*, letaknya sangat strategis di poros jalan raya Maros-Makassar sehingga mudah untuk dijangkau; *kedua*, lokasi penelitian tersebut sangat unik bagi peneliti, karena Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini merupakan satu-satunya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Maros yang tidak menerima KB sejak didirikannya pada tahun 1970 hingga penelitian ini berlangsung.

Jumlah subyek penelitian dalam penelitian ini memang tidak ditentukan karena dalam studi kasus seperti ini, besar kecilnya (jumlah) subyek penelitian tidak dapat dijadikan sebagai ukuran utama. Yang terpenting dalam studi seperti ini adalah kedalaman, kompleksitas dan kekayaan/kelengkapan data. Karena itu

jumlah subyek ditentukan berdasarkan kecukupan data. Salah satu ukurannya adalah kejenuhan data diukur berdasarkan pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring-sudah mulai terjadi pengulangan informasi, kegiatan koleksi data sudah dapat diakhiri.⁵³

Penentuan subyek yang diwawancarai menggunakan teknik “bola salju”, mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak. Berdasarkan teknik ini, penentuan subyek dilakukan jika subyek sebelumnya sudah diwawancarai dan hasil wawancaranya sudah dianalisis. Setiap subyek berikutnya ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan informasi yang sudah dijaring dan dianalisis.

Pelaksanaan wawancara mendalam dalam penelitian ini berlangsung setelah peneliti mengenal subyek-subyek penelitian yang memiliki pengetahuan luas baik mengenai keluarga berencana maupun mengenai kehidupan di pesantren. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 20 September 1999. Hasil wawancara pertama ini ditranskrip ke dalam bentuk tulis untuk dianalisis setelah diadakan analisis dan interpretasi terhadap hasil wawancara berikutnya yang juga dianalisis dengan teknik yang sama dengan analisis terhadap hasil wawancara pertama sampai dirasakan adanya kejenuhan data.

Jumlah subyek penelitian tidak ditentukan secara baku. Dengan penelitian kualitatif jumlah subyek bukan merupakan syarat utama, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari sumber data yang dikumpulkan. Dengan kata

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 166.

lain subyek akan terus dicari hingga data yang terkumpul dinilai telah mencukupi.

Jumlah seluruh subyek yang berhasil ditemui dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Dari jumlah subyek tersebut terdapat 5 orang yang tidak dapat diturunkan dalam laporan tesis. Hal ini dikarenakan informasi dari 5 subyek yaitu (Dw), (Hy), (Mn), (It) dan (Ns) menurut peneliti tidak atau kurang dapat memberikan informasi yang mencukupi. Dengan demikian terdapat 6 subyek dalam penelitian yaitu (Nd), (Nh), (Hn), (Id), (Sh) dan (Nm).

(Nd) seorang guru di Pondok Pesantren Darul Istiqamah berusia 35 tahun bersuamikan seorang ustadz dengan tujuh orang anak, empat orang perempuan dan tiga orang laki-laki. Keluarga ini menempati sebuah rumah panggung yang sederhana dengan perabot yang sederhana pula namun tidak tertata rapi.

(Nd) ini cukup aktif dalam kegiatan di pesantren, dan subyek inilah yang menginformasikan kepada peneliti subyek-subyek lain dan kalau akan diadakan pengajian. Subyek ini juga menolak adanya KB, walaupun anaknya sudah 7 orang dan seorang diantaranya mengalami keterbelakangan mental. (Nd) ini tidak mau menggunakan KB secara modern tetapi secara tradisional dia berusaha untuk mencari dan bertanya kepada peneliti.

(Nh) seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun bersuamikan seorang pegawai negeri dengan tiga orang anak-dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Rumahnya sebuah rumah panggung yang sangat sederhana dengan perabotan yang sederhana pula namun tertata dengan rapi.

Sehari-harinya ia mengurus rumah tangganya dan memiliki ketrampilan menjahit. Oleh karena itu dapat menerima jahitan di rumahnya tanpa harus meninggalkan keluarganya. Subyek ini juga aktif di kelompok pengajian di pesantren tersebut. Sejak kelahiran anaknya yang ketiga sudah menggunakan alat kontrasepsi tapi masih dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan agama.

(Hn) sekarang berusia 22 tahun dengan 3 orang anak. Dia mempunyai penampilan yang sangat lugas dengan gaya bicaranya yang khas dan terus terang. Pada usia yang relatif muda untuk ukuran sekarang, dia sudah berumah tangga dengan tiga orang anak. Suaminya bekerja sebagai guru di pesantren tersebut.

Subyek (Hn) ini menggunakan alat kontrasepsi dengan kesadaran sendiri sejak anaknya yang ketiga lahir dengan dukungan sepenuhnya dari suami. (Hn) ini menganggap bahwa dengan berKB dia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya.

(Id) berusia 28 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi memenuhi pesanan pondok pesantren dengan memiliki 4 orang anak. Saat ditemui peneliti dia sedang mengandung anaknya yang kelima dengan usia kandungannya 6 bulan. Suaminya sehari-hari bekerja sebagai penarik becak yang mangkal di pintu masuk pesantren.

(Sh) berusia 35 tahun dengan jumlah anak 5 orang, bersuamikan seorang pegawai negeri sipil. Sehari-hari ia menerima pesanan baik berupa masakan maupun kue. Dia termasuk salah seorang yang aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di pesantren tersebut. Dalam merespon keluarga berencana dapat digolongkan sebagai kelompok yang terhegemoni penuh.

Subyek (Nm) berusia 31 tahun dengan jumlah anak 3 orang. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah kelas 2 Madrasah Aliyah di pesantren tersebut. Kemudian dia mengambil kursus Guru Taman Kanak-Kanak. Kursus ini nampaknya yang mengantarkan dia menjadi guru taman kanak-kanak di lingkungan pesantren. Bersama suami dan anak-anaknya dia menempati rumah tembok yang sangat sederhana.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, data utama studi ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan tindakan atau perilaku yang diamati dari subyek studi.⁵⁴ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, sesuai yang dikemukakan Oetomo bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan: (a) Wawancara mendalam dan terbuka; data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan. (b) Observasi langsung; data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, tindakan dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. (c) Penelaahan terhadap dokumen tertulis; data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis atau program; memorandom-memorandom dan

⁵⁴ Lihat Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1975), h.5; Lihat pula Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 112.

korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei.

Validitas dan rehabilitasi data kualitatif banyak bergantung pada ketrampilan metodologis, kepekaan dan integritas peneliti. Observasi yang sistematis dan ketat (*rigorous*) melibatkan peneliti jauh hanya berada di suatu tempat dan melihat-lihat sekelilingnya. Melakukan wawancara yang trampil melibatkan jauh lebih dari hanya mengajukan pertanyaan. Analisis ini menuntut jauh lebih banyak dari hanya membaca apa yang ada.

Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dalam metode-metode kualitatif banyak bergantung pada ketrampilan, kemampuan dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan.⁵⁶

Sebelum peneliti terjun ke lapangan, terlebih dahulu peneliti mengurus surat izin penelitian dari Rektor Unair yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Direktorat Sosial Politik Jawa Timur.

⁵⁶Dede Oetomo dalam Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 152-153.

Berbekal dengan informasi dari teman, peneliti berangkat dengan menggunakan angkutan kota. Tepat jam 11.30 WIB peneliti tiba di kantor tersebut setelah tersesat di jalan. Dengan memperlihatkan surat dari Rektor Unair peneliti dilayani dan disuruh menunggu di luar sambil mengisi formulir dan disuruh menunggu di luar. Tidak lama kemudian nama peneliti dipanggil dan disuruh memperbanyak surat izin penelitian yang sudah selesai. Setelah itu peneliti diberi petunjuk untuk kelanjutannya. Peneliti merasa bersyukur karena informasi dari teman menyatakan bahwa surat izin penelitian akan selesai tiga hari kemudian dan kalau mau cepat maka siapkan amplop tetapi peneliti dapat memperolehnya hanya dalam sehari dan tanpa amplop.

Setelah mengurus surat izin penelitian, peneliti mengadakan persiapan untuk pulang ke Makassar. Sebelum pulang peneliti berkonsultasi dengan pembimbing untuk meminta bagaimana langkah-langkah berikutnya di lapangan sekaligus untuk pamit. Pada hari itu juga peneliti pergi untuk membeli tiket kapal laut. Dua hari kemudian, peneliti dengan ditemani anak menuju pelabuhan Tanjung Perak untuk pulang ke Makassar dengan menempuh waktu 24 jam perjalanan laut. Keesokan harinya, kapal merapat di Pelabuhan Soekarno Hatta. Setelah istirahat beberapa hari di rumah, peneliti melanjutkan urusan studi.

Pada hari senin jam 10.00 WITA, peneliti menuju ke Kantor Direktorat Sosial Politik Sulawesi Selatan yang terletak di lantai dua berdasar informasi dari teman yang sudah mengurus terlebih dahulu. Sesampainya di kantor tersebut, peneliti memperkenalkan diri dan tujuan kunjungan kemudian dilayani dan

disuruh datang keesokan harinya untuk mengambil surat izinnya. Keesokannya peneliti kembali dan surat yang diperlukan sudah selesai dan diamplop.

Beberapa hari kemudian peneliti melanjutkan urusannya dengan berangkat menuju ke Kantor Direktorat Sosial Politik Kabupaten Maros, tibanya di sana peneliti tidak menemui petugas yang mengurus surat izin penelitian akhirnya peneliti menitipkan berkas untuk kelengkapan karena jam kantor sudah usai petugasnya belum kunjung datang. Esoknya peneliti datang kembali dan suratnya sudah selesai dan ditujukan ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah.

Setelah selesai mengurus izin penelitian, peneliti mengadakan observasi ke obyek penelitian. Dengan mengetahuinya lokasi penelitian maka peneliti mulai memperkenalkan diri. Pertama kali berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah peneliti meminta bantuan seorang teman yang mengenal baik keadaan pesantren karena baru kali ini peneliti memasuki Pondok Pesantren Darul Istiqamah tersebut. Peneliti hanya tahu keadaan berKB di sana dari seorang teman yang bertugas sebagai penyuluh KB di pesantren tersebut. Kunjungan berikutnya peneliti jalan sendiri, ternyata bagi perempuan yang akan masuk ke pesantren tersebut diharuskan untuk mengenakan busana muslimah, karena peneliti tidak berjilbab maka piket meminjamkan mukenah kepada warga setempat.

Sewaktu peneliti berkunjung ke rumah pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah untuk bertemu dengannya dan istrinya tetapi suaminya tidak menerima dengan baik dan mengatakan bahwa tidak usah dilayani karena hanya akan merusak citra saja. Tapi istrinya maklum akan sikap suaminya, maka peneliti

melalui teman di suruh berkunjung saat suaminya tidak ada di rumah. Beberapa hari kemudian peneliti bertandang ulang sesuai perjanjian sebelumnya, akhirnya peneliti bebas membahas berbagai hal termasuk tujuan peneliti serta di tunjukkan warganya yang bisa dijadikan subyek penelitian. Setelah wawancara selesai akhirnya peneliti mohon pamit dan menyatakan sewaktu-waktu kalau ada keperluan penelitian akan dihubungi kembali.

Berdasar informasi dari subyek pertama, peneliti memperoleh nama dan alamat subyek berikutnya. Selanjutnya peneliti tidak menemui lagi hambatan yang berarti dalam melakukan wawancara dan penulis sudah merasa lega dan bebas berkunjung ke rumah warga di pesantren tersebut karena maksud dan tujuan peneliti sudah diketahui dan mendapat respon dari ibu-ibu yang menjadi subyek penelitian.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dan pada hari raya Idul Fitri peneliti menyempatkan diri untuk bersilaturahmi kepada ibu-ibu yang telah rela dan ikhlas mengorbankan waktunya untuk dijadikan subyek penelitian sebagai ucapan terima kasih.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam guna menghimpun data yang tidak dapat diobservasi. Dengan demikian penulis mengharapkan pengumpulan data dapat lebih fleksibel dan mendalam sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

(1) Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk menggali data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya⁵⁶ yang ada kaitannya dengan keluarga berencana. Dengan demikian, data tentang keluarga berencana yang berkaitan dengan perempuan Islam dikumpulkan dari Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur dan Perpustakaan BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan.

(2) Teknik Observasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemahaman respon perempuan Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang terlukis dalam setiap perkataan, diskusi maupun dalam pembicaraan mereka sehari-hari.

Pelaksanaan observasi ini berlangsung sejak adanya ide untuk menjadikan perempuan Islam yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah sebagai subyek penelitian.

(3) Teknik Wawancara

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data ini. Wawancara yang dilakukan dapat digolongkan kepada wawancara mendalam

Untuk menghindari kekakuan dan kedangkalan data yang diperoleh, maka wawancara ini dilakukan secara bebas dan leluasa, yang biasanya disebut dengan

⁵⁶Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

dengan wawancara tidak terstruktur.⁵⁷ Walaupun wawancara dilakukan tidak terstruktur, peneliti tetap menyusun pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subyek, sebagai pedoman peneliti, agar pertanyaan diajukan dapat lebih terfokus pada permasalahan penelitian. Pedoman pertanyaan tersebut hanya berfungsi sebagai acuan yang memungkinkan berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga dalam melakukan wawancara tidak harus sama persis seperti pertanyaan yang telah disusun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan supaya peneliti mendapatkan informasi lebih banyak dan penilaian terhadap fenomena akan lebih banyak ditentukan oleh subyek yang diteliti, bukannya oleh peneliti

Untuk melengkapai data yang diperoleh di lapangan atau data primer, dalam penelitian ini juga dilakukan penelusuran data sekunder. Data sekunder berupa studi kepustakaan dokumen-dokumen, data monografi kelurahan maupun kecamatan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelusuran data sekunder tersebut diantaranya menyangkut teori atau konsep-konsep tentang ideologi, hegemoni dan program keluarga berencana.

Beberapa pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Menurut keyakinan ibu, misalnya menurut agama, morai, apakah semua cara dan usaha dalam program keluarga berencana ini diperbolehkan?
2. Bagaimana tanggapan atau penilaian ibu tentang pembatasan anak cukup dua saja?

⁵⁷Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), h. 135.

3. Menurut ibu, 'dua anak cukup' sebagai sesuatu yang abadi dalam arti untuk selamanya atau sementara saja.
4. Bagaimana menurut ibu tentang slogan keluarga berencana 'laki-laki perempuan sama saja' ?
5. Bagaimana ukuran keluarga ideal menurut ibu ?
6. Bagaimana pendapat ibu tentang pandangan 'banyak anak banyak rejeki'?
7. Bagaimana ibu mengartikan atau apa yang terpikir oleh ibu mengenai kampanye keluarga berencana yang ada di media massa seperti koran, radio, televisi dan papan-papan iklan ?
8. Apakah ibu ikut program keluarga berencana ?
9. Jika tidak ikut keluarga berencana, apa alasan ibu ?
10. Jika ikut keluarga berencana, siapa yang mengajak dan apa alasan ibu ?
11. Sejak kapan ibu ikut keluarga berencana, dan memakai alat kontrasepsi apa ?
12. Mengapa ibu memakai alat kontrasepsi tersebut ?
13. Menurut ibu siapa yang harus membiayai, jika seseorang hendak ikut keluarga berencana ?
14. Apakah ibu memiliki rasa bersalah, malu atau takut jika tidak ikut keluarga berencana ?
15. Jika ibu telah mempunyai dua orang anak, apakah masih mempunyai keinginan untuk menambah anak lagi ?
16. Apakah ada sanksi bila tidak ikut keluarga berencana ? Bila ya, seperti apa sanksi yang didapat.

Teknik Analisis Data

Untuk tujuan memudahkan analisis data, diusahakan semua data diubah dalam bentuk tulis lebih dahulu. Setelah seluruh data yang terkumpul ditranskrip dalam bentuk teks tertulis, data itu kemudian dianalisis. Proses analisis dan penafsiran data data dalam penelitian ini lebih banyak mengikuti pendapat Moleong⁵⁸.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data baik yang dihimpun dari studi pustaka, studi literatur maupun yang berupa catatan etnografis⁵⁹ yang dihimpun dari observasi dan wawancara. Setelah ditelaah, diadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang disusun dalam tema-tema dan sub-sub tema sambil memberi kode-kode tertentu.

Supaya lebih jelas, langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data ini diurutkan sebagai berikut:

- (1) Peneliti menelaah data tentang respon perempuan Islam dalam memahami keluarga berencana secara lengkap dan cermat.
- (2) Peneliti menyeleksi dan mereduksi data. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan respon perempuan Islam dalam memahami keluarga berencana serta menyisihkan data tidak relevan.
- (3) Peneliti merinci data dan mengklasifikasikannya ke dalam tema-tema utama yang sudah ditentukan. Tema utama itu kemudian dipisah-pisahkan ke dalam sub tema akhirnya ke dalam persoalan-persoalan yang lebih khusus. Tiap-tiap

⁵⁸ Moleong, *Metodologi...*, h. 189-214.

⁵⁹ Catatan etnografis terdiri atas catatan lapangan tertulis, baik catatan hasil observasi, wawancara, rekaman, buku harian atau dokumen pribadi lainnya. Lihat James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 89.

persoalan khusus itu mempunyai catatan tersendiri yang berisi pernyataan-pernyataan relevan yang dibuat subyek penelitian.

- (4) Peneliti menyajikan data. Karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, data disajikan dalam bentuk catatan deskriptif dengan cara mengutip pernyataan subyek apa adanya dan bukan meringkaskan apa yang dikatakan.⁶⁰

Setelah dianalisis dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian diadakan pembahasan(penafsiran) data dengan menggunakan metode analisis komparatif⁶¹ yang tahap-tahap pelaksanaannya diuraikan satu persatu sebagai berikut:

- (1) Perbandingan peristiwa atau pernyataan subyek yang aplikatif terhadap setiap tema. Pada tahap ini peneliti membandingkan peristiwa atau pernyataan sebelumnya dalam kelompok yang sama dan kelompok yang berbeda pada tema yang sama.
- (2) Integrasi tema dan kawasannya. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara peristiwa atau pernyataan subyek dengan sub-sub tema dan persoalan-persoalan khusus sehingga dihasilkan akumulasi pengetahuan yang berkenaan dengan persoalan-persoalan suatu tema yang sudah siap diintegrasikan dan dihasilkan suatu kesatuan yang utuh. Integrasi juga dilakukan terhadap suatu tema dengan tema lainnya sehingga konsep berkembang setelah bermacam-macam tema dan sub-subnya menjadi terintegrasi.

⁶⁰ Noeng Mubajir, *Metodologi...*, h.102.

⁶¹ Lihat Moleong, *Metodologi...*, h.107-213.

- (3) Pembatasan konsep. Tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan reduksi atau memformulasikan konsep ke dalam seperangkat konsep yang tinggi tingkatan abstraksinya atas dasar keragaman seperangkat tema dan sub-subnya. Reduksi ini tidak hanya dilakukan dengan jalan perbandingan antarkelompok yang berasal dari segi substantif, tetapi juga dilakukan dengan jalan perbandingan dari kepustakaan atau pendapat para ahli. Dengan demikian, dilakukan aplikasi konsep kepada situasi yang lebih luas yang tentu saja dengan tetap memperhatikan kaitan konsep dengan data.
- (4) Penulisan tesis. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan mengumpulkan catatan-catatan dari setiap tema dan mempelajarinya. Kerangka analisis peneliti tentu saja sudah berbentuk konsep substantif yang disusun dalam pernyataan-pernyataan yang beralasan tepat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian yang meliputi : Keadaan Penduduk Kabupaten Maros Ditinjau dari Kesertaan berKB dan Profil Wilayah dan Masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Keadaan Geografis dan Fisik dan Kependudukan.

Keadaan Penduduk Kabupaten Maros Ditinjau dari Kesertaan berKB

Secara administratif Kabupaten Maros terbagi dalam tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Mandai, Bantimurung, Camba, Maros Utara, Tanralili dan Mallawa. Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang mempunyai wilayah pegunungan dan dataran. Kecamatan yang terletak di wilayah pegunungan adalah Kecamatan Camba dan Mallawa, dan kecamatan Tanralili dan Bantimurung merupakan kecamatan yang wilayahnya di pegunungan dan dataran sedangkan Kecamatan Maros Baru, Maros Utara dan Mandai merupakan kecamatan yang wilayahnya di dataran.

Di Kabupaten Maros ini terdapat beberapa fasilitas yang mendukung pertumbuhan perekonomiannya dengan adanya Bandara Internasional Hasanuddin, pabrik semen Bosowa dan daerah wisata air terjun Bantimurung dengan kupu-kupu yang beraneka warna dan jenis. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di sebelah utara Kotamadya Makassar dan juga berbatasan langsung sehingga masyarakat yang bermukim di kabupaten yang letaknya di sebelah utara

Kotamadya Makassar bila ingin memasuki Kotamadya Makassar maka harus melewati Kabupaten Maros.

Berdasarkan data dari Kantor BKKBN Kabupaten Maros periode bulan Januari 2000, Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 44.596 orang dengan pencapaian akseptor aktifnya sebanyak 29.779 akseptor atau 66,77% dari jumlah PUS. Dari jumlah akseptor aktif tersebut yang menggunakan Metode Jangka Panjang (MJP) sebanyak 5.528 akseptor atau 18,56% dengan rincian yang menggunakan alat kontrasepsi IUD/spiral sebanyak 3.019 akseptor, implant sebanyak 566 akseptor dan Metode Operasi (MO) sebanyak 1.943 akseptor sedang pencapaian Non MJP sebanyak 24.251 akseptor atau 81,44% dengan rincian yang menggunakan alat kontrasepsi pil sebanyak 8.830 akseptor, suntik sebanyak 15.147 akseptor dan kondom/obat vaginal sebanyak 247 akseptor. Dengan jumlah pencapaian sebanyak 29.779 akseptor maka realisasi dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebanyak 30.731 akseptor sudah terealisasi sebanyak 96,90%. (Tabel 1)

Berdasarkan pencapaian akseptor aktif tingkat kabupaten, maka dari ketujuh kecamatan yang ada, Kecamatan Camba menempati urutan pertama dengan jumlah pencapaian akseptor aktif sebanyak 3.086 akseptor atau 71,31% dari jumlah PUS sebanyak 5.354 orang. Pencapaian akseptor aktif yang terendah ditempati Kecamatan Bantimurung dengan jumlah pencapaian sebanyak 3.728 akseptor atau 58,53% dari jumlah PUS sebanyak 6.369 orang. Sedang Kecamatan Maros baru sebagai ibukota kabupaten hanya berada di urutan keempat dengan jumlah pencapaian sebanyak 9.942 akseptor atau 67,57% dari jumlah PUS 14.714

orang yang juga merupakan kecamatan yang mewilayahi Pondok Pesantren Darul Istiqamah. (Tabel 1).

Dari segi pencapaian MJP, kecamatan yang tinggi pencapaiannya adalah Kecamatan Mallawa sebanyak 474 orang atau 30,06% (IUD/spiral sebanyak 68 orang, implant sebanyak 77 orang dan MO sebanyak 399 orang) dari jumlah pencapaian akseptor aktifnya 1.577 orang, Kecamatan Maros Utara sebagai kecamatan yang terendah pencapaiannya hanya 314 akseptor atau 10,63% (IUD/spiral sebanyak 210 akseptor, implant sebanyak 20 akseptor dan MO sebanyak 84 akseptor) dari jumlah pencapaian akseptor aktifnya sebanyak 2.957 akseptor. Sedang Kecamatan Maros Baru hanya berada di urutan ketiga dengan jumlah pencapaian MJP sebanyak 2.061 akseptor atau 20,73% (IUD/spiral sebanyak 1.722 akseptor, implant sebanyak 232 akseptor dan MO sebanyak 107 akseptor) dari jumlah pencapaian akseptor aktif sebanyak 9.942 akseptor. (Tabel 1)

Pencapaian Non MJP yang tertinggi adalah Kecamatan Maros Utara dengan jumlah 2.643 akseptor atau 89,38% (pil sebanyak 1.374 akseptor, suntik sebanyak 1.244 akseptor dan kondom/obat vaginal sebanyak 25 akseptor) dari jumlah pencapaian akseptor aktif sebanyak 2.957 akseptor. Kecamatan Mallawa dengan jumlah pencapaian sebanyak 1.103 akseptor atau 69,94% (pil sebanyak 223 akseptor, suntik sebanyak 880 akseptor dan tidak ada yang menggunakan kondom/obat vaginal) dari jumlah pencapaian akseptor aktif sebanyak 1.577 akseptor sebagai kecamatan yang berada di urutan terakhir dalam pencapaian Non MJP. Sedang Kecamatan Maros Baru hanya berada di urutan keempat dengan

jumlah pencapaian sebanyak 7.881 akseptor atau 79,27% (pil sebanyak 2.929 akseptor, suntik sebanyak 4.869 akseptor dan kondom/obat vaginal 83 akseptor) dari jumlah pencapaian akseptor aktif sebanyak 9.942 akseptor. (Tabel 1).

Pencapaian akseptor baru yang dapat direalisasikan di Kabupaten Maros berdasarkan laporan bulan Januari 2000 sebanyak 5.411 akseptor dengan rincian MJP sebanyak 878 akseptor (IUD/spiral sebanyak 248 akseptor, implant sebanyak 630 akseptor dan MO tidak ada), sedang Non MJP sebanyak 4.533 akseptor (pil sebanyak 2.294 akseptor, suntik sebanyak 2.215 akseptor dan kondom/obat vaginal 24 akseptor). Kecamatan yang tertinggi pencapaian akseptor baru MJP adalah Kecamatan Mandai sebanyak 197 akseptor (IUD/spiral sebanyak 85 akseptor dan implant sebanyak 112 akseptor). Yang terendah adalah Kecamatan Maros Utara sebanyak 69 akseptor (IUD/spiral sebanyak 25 akseptor dan implant sebanyak 44 akseptor) sedang Kecamatan Maros Baru hanya berada di urutan kelima dengan jumlah pencapaian sebanyak 112 akseptor (IUD/spiral sebanyak 83 orang dan implant sebanyak 29 akseptor). (Tabel 2)

Untuk pencapaian Non MJP, yang tertinggi dengan jumlah 1.581 akseptor (pil sebanyak 738 akseptor, suntik sebanyak 827 akseptor dan kondom/obat vaginal sebanyak 16 akseptor) adalah Kecamatan Maros Baru dan yang terendah adalah Kecamatan Mallawa hanya 170 akseptor (pil 99 akseptor, suntik sebanyak 70 akseptor dan kondom/obat vaginal sebanyak 1 akseptor). (Tabel 2)

Tabel 1. Pencapaian Akseptor Aktif Per Mix Kecamatan:
Kabupaten Maros, Januari 2020

No	KECAMATAN	PUS	FPM	JUD	DMP	MO	JML MJP	%	PH.	STK	KDM	JML MON MJP	%	TOTA L	%
1	MAROS BARU	14.714	9.942	1.722	232	107	2.061	20,73	2.079	4.959	83	7.881	79,27	9.942	67,57
2	MANDAI	5.661	3.883	450	145	270	866	21,20	1.483	1.453	81	3.071	78,00	3.937	69,52
3	BANTING MURUNG	6.369	4.680	217	82	325	624	16,24	449	2.672	43	3.164	83,26	3.738	58,53
4	CAMBA	5.334	3.818	187	26	519	732	19,17	703	2.378	5	3.085	80,85	3.818	71,31
5	MAROS UTARA	4.349	2.957	210	20	82	316	10,62	1.374	1.244	25	2.643	89,38	2.957	67,99
6	TANRAJALI	5.749	3.874	165	53	219	457	11,80	1.669	1.738	10	3.417	88,20	3.874	67,38
7	MALJAWA	2.400	1.577	68	7	395	474	30,06	233	880	0	1.105	69,94	1.577	65,71
8	MAROS	44.586	30.731	3.019	566	1.943	5.528	18,56	8.830	15.174	247	24.251	81,44	20.779	66,77

Tabel 2. Pencapaian Akseptor Baru Per Mix Kecamatan:
Kabupaten Maros, Januari 2020

No	KECAMATAN	JUD	DMP	MO	JML MJP	%	PU.	STK	KDM	JML MON MJP	%	TOTA L
1	MAROS BARU	83	29	-	112	6,62	738	827	16	138	93,32	1.663
2	MANDAI	85	112	-	197	23,69	271	287	3	361	74,61	738
3	BANTING MURUNG	29	110	-	139	17,68	397	349	1	647	82,31	786
4	CAMBA	12	111	-	123	10,90	334	158	3	495	80,10	618
5	MAROS UTARA	23	44	-	67	13,45	167	277	-	444	86,55	511
6	TANRAJALI	11	77	-	88	12,17	288	347	-	635	87,83	723
7	MALJAWA	3	147	-	150	48,88	99	79	1	170	53,12	320
8	MAROS	248	630	-	878	16,23	3.294	225	24	4.513	83,75	5.411

Profil Wilayah dan Masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah

Tidak jauh disebelah utara Kotamadya Makassar, tepatnya di KM 25, terdapat sebuah pesantren yang dikelola oleh sebuah yayasan. Pesantren ini dikenal dengan nama Darul Istiqamah. Darul istiqamah memulai usahanya dalam membentuk manusia muslim, mu'min dan muhsin sejak tahun 1970 dan berhasil mencetak beberapa mubaligh yang mukhlis.

Setelah pendiri dan pengasuh Darul istiqamah melihat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara para ulama dan mubaligh, yaitu dengan adanya beberapa mubaligh yang menyalahgunakan da'wah Islamiyah sehingga menimbulkan bentrokan antara mubaligh dan para ulama itu sendiri, sehingga timbulah suatu pemikiran untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren dengan mengutamakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, serta membekali anak didik dengan ketrampilan agar nanti tidak terjadi pengangguran dan mereka dapat hidup berdikari dan tidak perlu mengemis.

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT dan mulai dengan murid sebanyak tujuh orang, Bapak Kyai Akmad Marzuki Hasan mulai merealisasikan idenya di atas tanah yang termasuk gersang satu hektar bertempat di kabupaten maros. Dari sinilah mulainya sejarah Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang sekarang dan sudah mempunyai 17 cabang dan 5 persiapan cabang.

Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini pada mulanya diasuh langsung oleh Kyai Ahmad Marzuki Hasan, seorang kyai yang hafal Al-Quran dan memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran serta menguasai Sunnah rasul SAW. Bapak kyai tersebut hanya dibantu putranya sendiri yang juga mewarisi

ayahnya dibidang penghafalan, penafsiran Al-Quran dan penguasaan Sunnah Rasul SAW. Kemudian dibantu oleh tenaga guru lainnya, ada yang berasal dari keluaran pesantren dalam dan luar negeri. Karena keuangan tersendat-sendat, maka Darul Istiqamah belum mampu mendatangkan guru untuk digaji sendiri, tetapi alhamdulillah pihak departemen Agama dan Depdikbud mengulurkan tangan dengan memberikan bantuan masing-masing 6 dan 1 orang guru. Disamping itu Darul Istiqamah juga sudah berhasil mencetak tenaga guru yang mukhlis, yang ditugaskan membantu mengajar di Pesantren Pusat dan menjadi pembina dan Pengasuh ditiap cabang.

Tanggal 5 September 1986 atau 1-1-1407 Hijriah Pimpinan Pusat pesantren K. Ahmad Marzuki Hasan menyerahikan kepemimpinannya kepada putranya yaitu Ustadz M. Arief Marzuki karena sudah merasa lanjut usia, dan putranya tersebut telah cukup memiliki kemampuan untuk menggantikan ayahandanya

Darul Istiqamah memegang prinsip “pendidikan seumur hidup” sejak lahir sampai ke liang kubur. Oleh karena itulah di pondok pesantren ini akan kita dapati pendidikan yang berbentuk klasikal yang dimulai dari TK sampai tingkat akademi, dan para santri dikatakan tamat Darul Istiqamah kalau sudah menyelesaikan sampai tingkat akademi.

Disamping itu ada juga bagian penghafalan Al-Quran dan pengajaran mengaji dari dasar, pendidikan ketrampilan dibidang perkebunan, peternakan, pertukangan dan penjahitan; di sana juga kita dapati halaqah untuk umum. Dihalaqah inilah diajarkan tafsir Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, khususnya

yang berkenaan dengan syariah dan akhlak. Pada tahun 1990 dibuka Kulliyatul Muballighin Al-Islamiyah (KMI) Darul Istiqamah yang dipimpin oleh Ustadz M. Anwar Harun, LC.

Dengan modal pertama tujuh orang santri, darul Istiqamah mulai melangkah menuju cita-cita, dan sampai pada akhir tahun 1970 santri bertambah menjadi 20 orang yang membangun gubuk-gubuk tempat berteduh di sekitar kediaman bapak Kyai. Pada tahun berikutnya, santri bertambah sedikit demi sedikit akhirnya mencapai 175 santri dan santriwati meskipun mereka terpaksa bernaung dibawah gubuk yang terbuat dari bambu dan beratapkan nipa. Dengan keadaan yang serba sangat sederhana itu Darul Istiqamah tetap berjalan menurut penggarisan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan bantuan dari para dermawan. Berkat ketabahan para pengasuh dan para santri, dari tahun ke tahun, santri terus bertambah dan berdatangan dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan Tenggara bahkan ada santri yang datang dari Maluku, Irian Jaya, NTT, Tim-Tim bahkan ada yang dari Malaysia.

Dengan datangnya santri dari Sulawesi dan luar Sulawesi, perhatian pemerintah dan masyarakatpun semakin besar terhadap pesantren ini. Diantara santri yang berdatangan ini, ada yang anak yatim dan anak fakir miskin yang menyebabkan adanya inisiatif untuk mendirikan panti asuhan.

Hingga kini anak panti asuhan tetap berjumlah 350 orang. Dan atas perhatian pemerintah dan masyarakat yang besar itu, kini Pesantren Darul Istiqamah sudah memiliki masjid yang permanen di Pusat Maccopa maros, mushalla semi permanen disebagian cabang dan masih darurat disebagian cabang

lainnya. Demikian pula ruang belajar dan asrama sebahagian kecil saja yang permanen, sebahagian yang semi permanen baik di pusat maupun di cabang, padahal jumlah santri dan santriwati saat ini sudah mencapai 3.000 orang lebih dan masih terus bertambah.

Keluarga yang bermukim di pesantren ini pada umumnya berasal dari luar dan juga sebagian dari santrinya yang sudah berkeluarga diberikan pilihan untuk tinggal dengan membangun rumah atau keluar dari lingkungan pesantren.

Kedaaan Geografis dan Fisik

Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini terletak di wilayah Kelurahan Taroda Kecamatan Maros Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Maros. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektar. Dibandingkan dengan letak pesantren lain yang ada, Pondok Pesantren Darul Istiqamah adalah paling strategis. Pesantren ini berjarak 3 kilometer dari ibukota kecamatan tetapi dari ibukota kabupaten hanya berjarak 1 kilometer. Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini adalah paling strategis karena dekat dengan pasar sebagai pusat perdagangan, pertokoan dan kantor-kantor pemerintahan.

Seperti kebanyakan wilayah yang ada di Kabupaten Maros, Pondok Pesantren Darul Istiqamah merupakan dataran dengan suhu udara yang relatif panas yaitu rata-rata 34 derajat Celcius. Namun demikian pada saat penelitian ini dilaksanakan sedang musim hujan sehingga banyak terdapat genangan air di mana-mana. Tapi pada musim kemarau, udara terasa panas, dengan sinar matahari yang cukup menyengat pada siang hari dan debu beterbangan di mana-mana.

Pada saat orang memasuki Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini diwajibkan untuk mengenakan busana muslim/jilbab, sedang bagi wanita yang tidak mengenakan busana muslim akan dipinjamkan oleh piket yang dilakukan secara bergantian oleh warganya setiap hari. Selain itu juga diharuskan mengisi buku tamu agar dapat diketahui mau menemui siapa dan apa tujuannya.

Bentuk pemukiman yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini berpencar mengikuti arah jalan yang hampir seluruhnya beraspal dan masih ada jalan yang dalam tahap pengerasan. Di depan Pondok Pesantren darul Istiqamah ini terdapat jalan raya yang merupakan jalan propinsi yang menghubungkan Kotamadya Makassar dengan Maros dan kabupaten-kabupaten lain yang terletak di sebelah utara Makassar dan sangat ramai karena semua kendaraan yang mau ke Makassar harus melewati jalan ini.

Bangunan rumah-rumah warganya sebagian besar merupakan rumah panggung, namun juga terdapat beberapa rumah yang terbuat dari tembok. Rumah-rumah panggung yang ada sebagian besar bentuknya sederhana, sementara rumah tembok yang ada kebanyakan belum berlantai keramik dan masih menggunakan lantai dari semen biasa.

Rumah-rumah penduduk pada umumnya mempunyai halaman yang relatif luas dan masih banyak tanah-tanah yang kosong. Namun diantara pemukiman penduduk terdapat beberapa kandang peternakan ayam dan itik sehingga membuat lingkungan sekitarnya kurang sehat apalagi kalau angin bertiup akan membawa bau yang kurang sedap.

Pembangunan sarana fisik di Pondok Pesantren Darul Istiqamah terlihat cukup memadai, diantaranya terdapat sarana peribadatan, pendidikan, telekomunikasi dan sarana kesehatan. Sarana peribadatan yang ada yaitu sebuah mesjid yang berlantai dua dan selalu ramai oleh jamaah setiap masuk waktu untuk melaksanakan shalat. Sarana pendidikan yang ada yaitu taman kanak-kanak, madrasah ibtdaiyah, tsanawiyah dan aliyah, sebuah warung telekomunikasi dan sebuah rumah bersalin dan poliklinik sebagai sarana kesehatan.

Kependudukan

Masalah Kependudukan memang sangat kompleks, yang meliputi berbagai aspek mulai masalah kelahiran, kesejahteraan penduduk hingga masalah kematian. Untuk mengetahui keadaan penduduk di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, penulis mengandalkan data monografi yang ada di pesantren, walaupun cukup sulit menemukan data keadaan penduduk yang terbaru. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk secara tepat memang memang tidaklah mudah. Hal ini diantaranya karena perubagan penduduk hampir terjadi setiap saat baik karena kelahiran, kematian, pindah tempat tinggal dan pendatang, disamping kekurangrapian dalam pengadministrasiannya.

Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah berdasarkan data terakhir sebanyak 1.135 jiwa, yang terdiri atas 574 orang laki-laki dan 561 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 236 jiwa. Sedangkan data penduduk yang lebih rinci dan data lain yang ada di papan monografi menunjukkan data bulan Juni 1998. Menurut salah seorang pengurus

pesantren, data itu adalah data terakhir. Seperti kebanyakan pencatatan data monografi yang lain, di Pondok Pesantren Darul Istiqamah pencatatan monografi terkesan kurang mendapat perhatian.

Keadaan Penduduk Berdasar Mata Pencarian

Dilihat dari sudut mata pencarian, ciri masyarakat perkotaan sangat tampak di Pondok Pesantren Darul Istiqamah ini, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar kepala keluarga yaitu 67 orang yang bermata pencarian wiraswasta/pedagang. Yang bekerja sebagai pegawai negeri atau guru berjumlah 52 orang, sebagai petani berjumlah 36 orang dan yang bekerja di sektor jasa berjumlah 42 orang.

Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pedagang diperkirakan mempunyai kaitan dengan semangat kerja masyarakat santri. Penelitian yang dilakukan oleh Sobary, menunjukkan kaitan antara kesalehan dan tingkah laku ekonomi atau semangat dagang. Pendapat informan yang dia kutip diantaranya menyebutkan bahwa Islam mengajarkan kerja keras dan seorang muslim yang ideal adalah orang yang mendudukkan ukhrawi dan usaha dengan seimbang.⁶² Semangat dagang masyarakat pesantren ini setidaknya tercermin oleh banyaknya penduduk yang bermata pencarian sebagai wiraswasta/pedagang dibanding dengan yang bermata pencarian yang lainnya.

⁶²Mohammad Sobary, *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*, (Yogyakarta: Benteng, 1995), h. 161.

Kedadaan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Di tinjau dari segi pendidikan, penduduk di Pondok Pesantren Darul Istiqamah mempunyai tingkat pendidikan yang relatif cukup tinggi. Walaupun masih terdapat penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD, tetapi penduduk yang berhasil tamat SMP atau yang sederajat adalah jauh lebih banyak. Jika ukuran wajib belajar 9 tahun dipakai sebagai ukuran berarti sebagian besar penduduk di Pondok Pesantren Darul Istiqamah telah menempuh batas minimal pendidikan yang harus ditempuh. Hal ini antara lain karena fasilitas pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Istiqamah cukup memadai. Data monografi pada saat penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa penduduk yang tidak tamat SD berjumlah 77 orang, tamat SD berjumlah 123 orang, tamat SMP berjumlah 139 orang dan tamat akademi dan perguruan tinggi berjumlah 64 dan 75 orang.

Kedadaan Penduduk ditinjau dari Kesertaan berKB

Dilihat dari kesertaan berKB, sebagian besar penduduk di Pondok Pesantren Darul Istiqamah dari kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mengikuti KB. Hal ini cukup menarik untuk dikaji mengingat program KB yang ada sudah diperkenalkan kurang lebih 30 tahun lamanya tetapi masih ada kelompok masyarakat yang tidak dapat menerimanya. Jumlah PUS yang ada di Pondok Pesantren darul Istiqamah ini sebanyak 124 orang, dari jumlah ini yang berKB hanya kurang lebih 10 hingga 20 persen saja itupun dengan cara tersembunyi.

Dari struktur masyarakat di Pondok Pesantren Darul Istiqamah dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Darul Istiqamah merupakan wilayah yang

dekat dengan ciri perkotaan. Secara geografis sangat diuntungkan karena letaknya yang berada di pusat kota Maros. Hal ini antara lain menjadi pendorong tingginya mobilitas masyarakat. Letak yang strategis ini juga mempermudah berbagai arus perubahan masuk ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang pada akhirnya menyebabkan perubahan penerimaan masyarakat terhadap inovasi dari luar. Ciri perkotaan lain yang melekat di Pondok Pesantren Darul Istiqamah adalah sektor pertanian yang tidak banyak digeluti masyarakat dan sebaliknya sektor jasa dan perdagangan yang tumbuh semakin cepat dan menjadi pilihan mata pencaharian.

BAB V

TEMUAN LAPANGAN

Untuk mengetahui proses hegemoni kyai, dalam bab ini akan dikemukakan data temuan lapangan tentang proses hegemoni kyai. Bab ini akan diawali dengan gambaran umum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian pesan-pesan penolakan KB, termasuk didalamnya keterlibatan institusi keagamaan. Di samping itu akan dikemukakan juga tentang proses resistensi warga masyarakat yang meliputi penolakan/perlawanan warga terhadap ide penolakan KB, serta metode kontrasepsi. Dengan deskripsi ini, diharapkan akan terlihat bagaimana model yang digunakan kyai dalam mensosialisasikan penolakan program KB dan bagaimana proses resistensi yang terjadi di masyarakat dengan diterapkannya penolakan program KB.

Bagian kedua mengemukakan pemahaman warga masyarakat tentang KB. Persoalan pertama yang akan dikemukakan menyangkut pengetahuan warga tentang KB yang dinilai sebagai dasar tentang kesediaan seseorang untuk ikut program KB. Selanjutnya diketengahkan tentang sikap dan perilaku warga terhadap KB. Dengan pemaparan pemahaman masyarakat tentang KB ini, diharapkan dapat ditelusuri apakah terdapat persamaan pemahaman tentang KB antara kyai dengan masyarakat. Jika terdapat persamaan pemahaman antara kyai dengan masyarakat, hal ini diperkirakan sebagai keberhasilan kyai dalam menghegemoni masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat mempunyai pemahaman sendiri tentang KB, hal ini dapat diartikan adanya resistensi dalam masyarakat.

Pesan Tentang Penolakan KB

Walaupun pelaksanaan program KB oleh banyak kalangan telah dinilai berhasil, namun pesan-pesan yang mengajak masyarakat untuk menolak mengikuti KB masih terus dilakukan oleh beberapa kelompok beserta institusi pendukungnya sampai saat ini.

Pesan-pesan yang disampaikan pada dasarnya mengajak seluruh masyarakat untuk membentuk keluarga keluarga harmonis, hidup sejahtera, sehat jasmani dan rohani, taat menjalankan syariat agama tanpa diukur dengan jumlah anak. Dengan kata lain, penolakan berKB ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Secara lebih khusus sasarannya adalah pasangan suami istri, dimana istrinya masih usia subur. Selain itu, para santri juga menjadi sasaran terutama untuk mengkampanyekan bentuk keluarga ideal menurut agama.

Dalam melembagakan penolakan KB, kyai beserta segenap lembaga pendukungnya menggunakan media interpersonal. Cara penyampaian pesan dengan menggunakan media interpersonal, antara lain dilakukan melalui kelompok pengajian dan ceramah-ceramah keagamaan di masjid.

Dengan memanfaatkan forum-forum pengajian yang diadakan oleh pondok pesantren dengan melibatkan warga masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan ini juga sering mengadakan pertemuan yang membicarakan masalah KB dengan petugasnya. Salah seorang pengurus (Hr) mengatakan sebagai berikut:

Pimpinan sering mengadakan pertemuan yang membahas masalah KB dengan petugas KB, kesehatan dan jajaran ABRI khususnya dalam rangka pelaksanaan program Manunggal KB-Kesehatan di Pondok

mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Masyarakat tampak dengan tekun dan sungguh-sungguh mengikuti pengajian tersebut. Kesungguhan mereka sangat tampak ketika mereka diberi kesempatan untuk bertanya. Tidak sedikit dari mereka bertanya tentang segala permasalahan yang mereka hadapi. Segala pertanyaan yang diajukan dijawab seluruhnya oleh penceramah, bahkan tidak jarang diselingi humor. Sebelum pengajian diakhiri pengurus berpesan kembali bahwa pengajian akan dilaksanakan pada hari Jumat minggu depan.

Walaupun ide KB telah muncul sejak tahun 1970-an dan hampir semua lapisan masyarakat mengenal ide KB tersebut, tapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat menerimanya. (Id) dan (Nm) misalnya mengemukakan bahwa: "...KB itu menurut agama tidak diperbolehkan untuk diikuti karena itu sama saja dengan melawan kehendak Allah dan bertentangan dengan moral. Tidak masalah baginya untuk mempunyai anak berapa saja, karena mereka tidak akan meminta pemerintah untuk membantu mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka". Sedang (Nd) itu mengatakan bahwa: "...Tidak akan ikut program KB karena baginya KB itu merupakan upaya untuk mengurangi umat Islam serta menggunakan cara-cara yang menyalahi syariat agama".

Perlawanan warga masyarakat terhadap KB tidak hanya dalam bentuk pikiran tapi juga dalam bentuk tindakan. Perlawanan masyarakat dalam bentuk pikiran tercermin dari sikap dan kesadaran mereka bahwa keinginan mempunyai

anak berapapun jumlahnya adalah hak pribadi sebagaimana pendapat (Nd), (Id) dan (Nm), dan beberapa subyek yang lain.

Warga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap KB baik dalam bentuk pikiran maupun tindakan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. (Nd) berasal dari keluarga yang sederhana dengan kondisi ekonomi cukup, dan mempunyai latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat. Dia mempunyai sikap menolak karena keyakinannya bahwa anak itu membawa rejeki sendiri-sendiri disamping itu dia juga patuh kepada orang tuanya dan aturan yang ada. Katanya: "Banyak anak banyak rejeki, orang-orang dulu juga tidak ada yang KB".

Demikian halnya dengan (Id). Dia mempunyai alasan yang sama dengan (Nd) dalam menolak KB. (Id) dapat dikategorikan sebagai keluarga yang secara sosial ekonomi kurang mampu, juga tidak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya dan mengemukakan bahwa anak itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tiap anak membawa rejekinya sendiri-sendiri. Penolakan ketiga subyek tersebut terhadap KB semakin kuat karena mendapat dukungan dari suaminya. Suami (Nd) misalnya yang seorang ustadz mengatakan bahwa: "...Berapapun anaknya dia sendiri yang akan membiayai dan tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah, dan merasakan semakin bertambah anaknya rejekinya juga semakin bertambah karena kelahiran setiap anak memberinya dorongan untuk makin giat bekerja".

Resistensi dalam Penolakan KB

Penolakan KB di Pondok Pesantren Darul Istiqamah sebagaimana di daerah lain, tampak adanya usaha kyai untuk menghegemoni masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak seluruh warga masyarakat dapat terhegemoni oleh kyai atau dengan kata lain terdapat resistensi dari warga masyarakat tersebut diantaranya dalam hal pesan-pesan penolakan KB dan pemakaian alat kontrasepsi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penyampaian pesan-pesan diantaranya dilakukan dengan pengajian-pengajian. Diantara subyek penelitian yang ditemui, terdapat subyek yang menyatakan tidak peduli atau kurang memperhatikan pesan-pesan tersebut, yaitu (Hn) dan (Nh). Mereka mengakui mengetahui atau pernah mendengar pesan tersebut, namun hal ini tidak pernah dihiraukan apa maksudnya. Perlawanan mereka juga diwujudkan dalam bentuk kesediaannya mengikuti KB namun dengan alasan kesehatan dan ingin lebih baik dalam mengurus anak. Sikap tidak peduli terhadap pesan-pesan tersebut dikarenakan mereka menganggap hal itu bukan sesuatu yang penting untuk diikuti. Menurut (Hn), hal yang penting adalah bagaimana mengurus dan menyekolahkan anak.

Subyek (Hn) ini mengikuti program KB sejak anaknya yang ketiga lahir dengan kesadarn sendiri dan mendapat dukungan dari suaminya. Mereka beranggapan bahwa tidak selamanya banyak anak banyak rejeki. Hal ini

disebabkan karena tingkat pendidikan suami istri tersebut cukup tinggi. Subyek (Hn) bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta.

Sedang subyek (Nh) ini mengikuti program KB bukan untuk membatasi jumlah anak tetapi untuk menjarangkan kelahiran dan juga menggunakan alat kontrasepsi yang mereka anggap tidak bertentangan dengan agama. Di satu sisi mereka melakukan perlawanan dalam bentuk pikiran, namun disisi lain mereka juga ikut KB.

Sikap resistensi terhadap alat kontrasepsi tertentu ditemukan pada subyek yang pada dasarnya menyetujui KB. Mereka setuju akan KB, namun tidak setuju tentang kontrasepsi tertentu. Subyek (Nh) peserta KB yang menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi. (Nh) memberikan alasan bahwa dengan menggunakan pil dia merasa mantap, terlebih lagi sudah mendapat ijin dari suaminya.

Pemahaman Perempuan Islam tentang KB

Pengetahuan Subyek tentang KB

Nilai keluarga kecil pada awalnya dapat dipandang sebagai nilai baru dalam masyarakat yang dalam perkembangannya nilai keluarga kecil tersebut dinilai banyak kalangan telah melembaga. Namun demikian dalam kenyatannya masih terdapat tarik menarik antara pemerintah yang berusaha melembagakan KB dengan masyarakat yang telah mempunyai nilai-nilai tersendiri tentang keluarga. Banyak fenomena menunjukkan sikap seseorang yang setuju terhadap KB, tidak selamanya diikuti dengan perilaku mengikuti KB. Demikian pula sebaliknya

dengan sikap seseorang yang tidak setuju terhadap KB. Ketidaksetujuannya diwujudkan dengan tidak mengikuti KB.

Temuan lapangan tentang pengetahuan masyarakat akan KB ternyata menunjukkan bagaimana mereka menyikapi KB. Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian pada dasarnya terdapat tiga kategori jawaban. Pertama, subyek yang menolak sama sekali; kedua, subyek yang menerima KB dengan syarat tertentu, misalnya tergantung alat kontrasepsi yang dipakai; dan ketiga, subyek yang menerima KB dengan sepenuhnya.

Subyek penelitian yang termasuk dalam kategori pertama adalah (Nd), (Id) dan (Nm). (Nd) adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai guru di pesantren tersebut. Ketika ditanya bagaimana sikap ibu terhadap KB, ia menjawab sebagai berikut:

KB itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi umat Islam, menyalahi tujuan perkawinan dan menentang kodrat Allah.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa:

Saya tidak malu karena tidak berKB, malah merasa bangga juga bangga karena mempunyai anak lebih dari dua orang, karena merasa lebih meyakini tuntutan agama.

Subyek yang lain adalah (Nm). Sehari-hari ia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adapun pandangannya tentang KB adalah:

KB itu menyalahi tujuan tujuan perkawinan, agama dan moral, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan laki-laki yang akan menikah supaya mencari wanita yang subur dan diakhirat nanti Nabi akan bangga dengan umatnya yang banyak.

Subyek (Nm) juga semakin kuat alasannya menolak KB karena banyak ibu-ibu yang telah lama ikut KB yang merasa kesehatannya terganggu dan gangguan-gangguan lainnya sehingga berhenti berKB.

Pernyataan kedua subyek tersebut, juga didukung oleh subyek (Id) yang menyatakan bahwa:

Untuk apa berKB, karena dengan tidak berKB kita telah menegakkan hukum agama Islam, sedang mempunyai anak lebih dari dua itu karena pemberian Tuhan kenapa harus malu dan tidak mungkin Tuhan memberi kalau kita tidak sanggup.

Subyek penelitian yang termasuk dalam kategori kedua antara lain adalah (Nh), seorang ibu rumah tangga. Ketika diminta pendapatnya tentang KB, penilaiannya banyak mengacu pada KB bukan untuk membatasi jumlah anak dan tergantung niatnya. Tentang KB dia menyatakan:

KB itu diperbolehkan jika keadaan darurat dan tergantung niatnya. Tujuan KB itu untuk menjarangkan kelahiran bukannya menghalangi, meskipun mau mempunyai beberapa orang anak itu merupakan hak pribadi kita.

Subyek tersebut menggunakan alat kontrasepsi yang menurutnya tidak bertentangan dan dibenarkan oleh agama.

Kategori yang terakhir adalah mereka yang menerima KB dengan sepenuhnya. Subyek yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah (Hn). Peneliti berhasil menghubungi subyek tersebut berkat bantuan ibu (Nd). Subyek itu berpendapat tentang KB, adalah:

Kita berKB harus ikhlas juga dengan meminta ridha Allah, insya Allah dengan berKB saya tidak punya perasaan berdosa. Yang saya takutkan jika punya anak tetapi tidak dapat memberi kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dan juga beranggapan bahwa tidak selamanya banyak anak banyak rejeki.

Dua Anak Cukup Laki Perempuan Sama Saja

Penerimaan masyarakat untuk memiliki anak dua saja dan penilaian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan ternyata masih bervariasi. Walaupun secara umum masyarakat tampaknya sudah dapat menerima ide norma keluarga kecil, tapi dalam masyarakat khususnya perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah mempunyai penilaian tersendiri terhadap anjuran untuk hanya memiliki dua anak saja. Adapun subyek yang menolak anjuran tersebut adalah (Nd), (Id), (Nm) dan (Sh).

(Nd) adalah seorang ibu rumah tangga disamping sebagai guru di pesantren tersebut mempunyai anak sebanyak tujuh orang, seorang diantaranya menderita keterbelakangan mental. Adapun pendapatnya tentang slogan tersebut di atas adalah:

Laki perempuan sama saja tergantung kehendak yang Maha Kuasa, tapi slogan itu tidak benar kalau dimaksudkan untuk mendukung program 'dua anak cukup'. Karena keluarga ideal tidak diukur dengan jumlah anak, tapi diukur apakah keluarga itu terarah sesuai dengan kehendak yang Maha Pencipta.

Subyek yang lain adalah (Id). Ia mempunyai penilaian yang hampir sama dengan (Nd), sambil menyitir ayat Al-Quran ia berpendapat:

Laki perempuan sama-sama nikmat dari Allah tapi kedudukannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak sama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, jadi wanita tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Banyak Anak Banyak Rejeki

Slogan “Banyak anak banyak rejeki” ini banyak dianut oleh orang-orang tua dulu. Slogan ini mengandung makna bahwa semakin banyak anak, semakin banyak pula rejekinya. Adapun subyek (Id) mempunyai pendapat tentang slogan tersebut:

Banyak anak banyak rejeki itu pandangan yang benar, karena semua anak yang lahir membawa rejekinya sendiri-sendiri, sebagaimana dia kutip dari Al-Quran yang berarti Allah yang memberi anak dan Dia pula yang memberi rejeki, jadi setiap anakitu ada rejekinya.

Berbeda dengan pandangan subyek (Hn) yang menyatakan bahwa:

Tidak selamanya banyak anak itu banyak rejeki, apalagi kalau tidak berusaha.

Alasan Mengikuti KB atau Tidak Mengikuti KB

Hasil wawancara terhadap subyek penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan atau motivasi seseorang sehingga ia berKB atau tidak. Alasan subyek yang mengikuti program KB tercermin dari pendapat (Hn) yang menjadi aksptor KB sejak anaknya yang ketiga lahir atas kesadaran sendiri dan dukungan penuh dari suami. Adapun alasannya sehingga berKB sebagai berikut:

Mengikuti KB dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik.

Dari seluruh subyek yang berhasil ditemui dan diwawancarai dalam penelitian ini, hanya dua orang yang mengikuti program KB secara modern dan yang lainnya tidak berKB.

Sedangkan subyek (Nd) tidak berKB karena alasannya:

KB itu menyalahi syariat agama terutama dari kemungkinan dilayani oleh petugas lawan jenis dan memandang bahwa KB itu adalah upaya untuk mengurangi jumlah ummat Islam.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, subyek (Nm) menyatakan bahwa:

KB itu menyalahi tujuan perkawinan dan bertentangan dengan agama dan moral juga merasa sangat takut karena adanya keluhan ibu-ibu yang telah lama ikut KB tapi merasa kesehatannya terganggu dan gangguan-gangguan lainnya sehingga ada diantaranya yang berhenti berKB.

Bagi subyek (Nm) yang tidak berKB menyatakan juga:

Tidak ada perasaan malu apalagi takut kalau tidak KB lagi pula malu dan takut pada siapa, yang boleh ditakuti hanya Allah SWT semata, tidak boleh kepada lainnya apalagi kepada orang yang menentang agama.

Senada dengan pernyataan di atas, subyek (Id) menyatakan bahwa dia tidak malu apalagi takut kalau tidak berKB dan mempunyai anak lebih dari dua orang, dengan alasan:

Dengan tidaknya berKB berarti saya telah menegakkan hukum agama Islam dan senang mempunyai anak lebih dari dua orang karena anak itu merupakan pemberian dari Tuhan kenapa harus malu dan tidak mungkin Tuhan memberi kalau kita tidak sanggup.

Bagi perempuan yang mengikuti KB mempunyai pilihan alat kontrasepsi yang bervariasi dengan alasan yang berbeda-beda pula. Terdapat dua kategori alasan subyek dalam memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi yaitu karena alasan kesehatan dan keyakinan bahwa kontrasepsi yang digunakan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Subyek (Nh) mengemukakan alasannya sehingga menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi:

Karena pil tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena dia berKB bukan untuk membatasi anak tetapi untuk menjarangkan kelahiran.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas subyek (Hn) juga memilih pil atas saran dari dokter yang melayaninya.

Ukuran Keluarga Ideal

Bagi perempuan Islam di Pondok Pesantren darul Istiqamah ukuran keluarga ideal bagi mereka ada beberapa pendapat yang berbeda. Salah seorang subyek menyatakan: "Keluarga ideal adalah keluarga harmonis, hidup sejahtera, sehat jasmani dan rohani serta taat menjalankan syariat agama". Subyek lain (Nd) mengemukakan sebagai berikut:

Keluarga ideal tidak diukur dengan jumlah anak, tapi diukur apakah keluarga itu terarah sesuai kehendak yang Maha Pencipta.

Ukuran keluarga ideal bagi (Nh), hampir sama dengan yang dikemukakan (Nd).

Keluarga ideal menurutnya adalah sebagai berikut:

Keluarga dimana ayah mampu menjadi pengayom dan pelindung bagi keluarganya, ibu yang mampu menjadi pembantu ayah dalam membina anak dan mengatur keadaan rumah tangganya dan mempunyai anak yang berbakti pada kedua orang tuanya.

Profil Subyek Penelitian

Dari data informasi tentang pemahaman, penilaian, sikap dan perilaku subyek terhadap aturan yang telah ditetapkan di pesantren sebagaimana telah dikemukakan di atas, muncul tiga kategori subyek yaitu subyek yang terhegemoni, subyek yang teresistensi superfisial dan subyek yang teresistensi secara riil. Dalam hal ini dipilih tiga orang subyek yang diharapkan dapat dianggap sebagai 'wakil' atau 'gambaran' dari masing-masing kategori. Untuk kategori subyek yang terhegemoni diwakili oleh subyek (Nd), sedangkan untuk

kategori subyek yang teresistensi superfisial diwakili oleh (Nh) dan (Hn) untuk subyek yang teresistensi riil. Kesemua subyek penelitian ini tinggal di lingkungan pesantren.

Profil Perempuan Islam yang Terhegemoni

Subyek (Nd) seorang guru fiqih dengan tujuh orang anak

(Nd) berusia 35 tahun, bersuamikan seorang ustadz dengan tujuh orang anak (4 perempuan dan 3 laki-laki). Keluarga ini tinggal di sebuah rumah panggung yang sederhana dengan perabot rumah tangga yang relatif sederhana pula tapi tidak tertata rapi.

Sehari-hari (Nd) mengurus rumah tangganya, kecuali hari Sabtu dan Minggu karena pergi mengajar di madrasah putri. Sedangkan suaminya selain sebagai ustadz juga memiliki peternakan ayam petelur dan itik. Peternakannya ini hanya berjarak kurang lebih satu meter dari rumah tinggalnya sehingga kalau angin bertiup akan tercium bau yang kurang sedap.

(Nd) ini cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan pesantren. Dan subyek inilah yang memberitahukan peneliti kalau akan diadakan pengajian. Subyek ini menolak KB secara modern tapi bertanya kepada peneliti kalau peneliti mengetahui bagaimana cara menggunakan KB secara tradisional, hal ini dikarenakan ada seorang anaknya yang menderita keterbelakangan mental dan juga sangat nakal. Anak-anaknya kurang terurus karena masih kecil-kecil semua, yang tertua baru kelas 5 sekolah dasar.

Keluarga (Nd) ini membangun rumah di dalam lingkungan pondok pesantren atas persetujuan pimpinan pondok. Dalam penelitian ini subyek (Nd)

termasuk dalam kategori perempuan Islam yang terhegemoni, dalam artian dia menerima aturan yang dikeluarkan oleh kyai untuk menolak adanya KB. Kesetiaannya terhadap kyai tidak didasarkan adanya hubungan kekeluargaan tetapi atas kesadaran sendiri.

Profil Perempuan Islam yang Teresistensi Superfisial

Subyek (Nh) seorang ibu rumah tangga

(Nh) ini berusia 44 tahun, bersuamikan seorang pegawai negeri dengan tiga orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan). Tinggal di sebuah rumah panggung yang cukup sederhana dengan perabotan yang sederhana pula tapi tertata dengan rapi.

Sehari-hari (Nh) mengurus rumah tangganya, tidak bekerja di luar rumah tetapi mempunyai keterampilan menjahit. Oleh karena itu (Nh) menerima jahitan di rumahnya untuk membantu penghasilan suaminya. Dan sejak kelahiran anaknya yang ketiga sudah menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi dengan pertimbangannya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Keluarga (Nh) ini merupakan salah satu warga dari pondok pesantren yang menetap di lingkungan pesantren. Keluarga ini mengenal kyai sejak menjadi murid dari pondok pesantren dan setelah tammat kemudian berkeluarga diajak oleh kyai untuk membangun rumah di lingkungan pondok pesantren. Jadi pada dasarnya subyek (Nh) ini tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kyai.

Dalam penelitian ini subyek (Nh) ini termasuk dalam kategori perempuan Islam yang teresistensi superfisial dalam artian dapat menerima keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi sebatas untuk

menjarangkan kelahiran dan bukan untuk membatasi jumlah anak. Dalam penggunaan alat kontrasepsi subyek (Nh) ini menggunakan alat kontrasepsi yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya.

Profil Perempuan Islam yang Teresistensi Riil

Subyek (Hn) seorang ibu rumah tangga juga seorang guru di sekolah swasta di luar pondok pesantren.

Subyek (Hn) sekarang berusia 22 tahun dengan tiga orang anak. Dia mempunyai penampilan yang lugas dengan gaya bicaranya yang bebas dan terus terang. Pada usia yang relatif muda untuk ukuran sekarang, dia sudah berumah tangga dengan tiga orang anak yang masih kecil-kecil. Suaminya bekerja sebagai seorang guru di pesantren tersebut. Juga tinggal di sebuah rumah panggung yang sederhana tapi perabot yang tertata dengan rapinya.

Subyek (Hn) ini juga mengajar di salah satu sekolah swasta di kota Maros. Setiap harinya ia pergi mengajar dengan menggunakan mobil angkutan umum. Subyek ini juga menggunakan alat kontrasepsi pil sejak kelahiran anaknya yang ketiga atas kesadaran sendiri dengan tujuan dapat memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.

Subyek (Hn) ini termasuk kategori yang teresistensi riil artinya dapat menerima KB apa adanya tanpa rasa takut kepada kyai, keluarga inipun termasuk keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan pondok pesantren dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kyai yang ada di pondok pesantren.

Profil Kyai yang Menghegemoni

Kyai (Ar) dilahirkan pada tahun 1942 di Maros dengan pendidikan terakhirnya tingkat Takhasus, sedang keahliannya adalah menghafal dan dapat menafsirkan Al-Quran dan menguasai Sunnah Rasul yang didapatkan dari ayahandanya yang juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Pada tahun 1986 ayahandanya menyerahkan kepemimpinan pondok pesantren kepadanya karena sudah dianggap mapan dan mampu untuk memimpin.

Kyai (Ar) ini mempunyai seorang istri yang juga mengajar disantri putri dengan mengajarkan bidang fiqhi dan syariat. Anaknya berjumlah 7 orang (3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki), anaknya yang tertua sudah sekolah di Pondok Pesantren Darul Istiqamah kelas 2 Tsanawiyah.

Dalam menghegemoni perempuan Islam di lingkungannya dilakukan dengan jalan menyitir ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tujuan perkawinan. Proses penghegemonian ini berlangsung secara *consensio*, dimana perempuan Islam mengikuti keinginan dan kemauan kyai tanpa adanya paksaan (*cerston*). Dalam mensosialisasikan ajarannya kyai menggunakan media interpersonal lewat pengajian yang dilakukan secara rutin di lingkungan pondok pesantren. Perempuan Islam yang terhegemoni dan resisten terhadap ajaran kyai bukan berasal dari lingkungan keluarganya karena kebanyakan keluarga yang menetap di pondok pesantren tersebut berasal dari luar dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

BAB VI

PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis data temuan lapangan tentang proses yang menandai hegemoni kyai dalam penolakan KB. Selanjutnya akan dianalisis tentang komponen KB yang diterima secara hegemonik dan ditolak (*resisted*) dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Disamping itu akan dianalisis juga sifat-sifat resistensi yang muncul dalam masyarakat.

Proses-Proses Sosial yang Menandai Hegemoni Kyai

Dalam melakukan pelembagaan penolakan KB tersebut terlihat adanya proses-proses sosial yang menandai hegemoni kyai. Hal ini dapat dimulai dari diputuskannya penolakan KB sebagai aturan dalam pesantren dengan berbagai strategi yang ditempuh.

Kekuatan ideologi agama tersebut terbukti masuk jauh ke dalam kehidupan perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Warga pesantren ini yang dikenal taat beragama, yang diperkirakan mempunyai resistensi yang tinggi terhadap ideologi lain, ternyata tidak seluruhnya dapat mengelak dari hegemoni kyai atau ideologi dominan. Bentuk keluarga besar hampir diterima oleh seluruh warga di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan subyek penelitian seperti pernyataan (Nd) dan (Id), yang pada dasarnya menyatakan bahwa warga pesantren menganut paham banyak anak

banyak rejeki. Sikap para kyai itu pulalah yang mempengaruhi warga pesantren dalam merespon keputusannya untuk menolak KB.

Bagaimana sebenarnya cara ideologi mempermudah atau mempengaruhi arah perubahan? Hal ini dapat dipahami dengan merujuk pada pendapat Lauer.⁶³ Dia mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 cara ideologi mempengaruhi perubahan yaitu: 1) ideologi yang membenarkan arah baru dengan cara mengacaukan tatanan lama dan mensahkan tatanan yang baru, ideologi ini memberikan kewenangan kepada tatanan baru; 2) ideologi yang mensahkan atau mengarahkan perilaku yang tidak mengetahui perubahan; 3) ideologi yang menyediakan basis solidaritas; 4) ideologi yang memotivasi melali kekuasaannya; dan 5) ideologi yang menghadapkan masyarakat pada suatu kontradiksi antara ideologi agama dan realitas yang memaksa orang untuk bertindak menyelesaikannya.

Kyai dalam melaksanakan kebijakannya tampaknya sejalan dengan cara-cara yang dikemukakan Lauer di atas. Bagi masyarakat pesantren penggunaan ideologi agama tampaknya merupakan cara yang paling efektif. Sebagaimana pendapat Lauer, masalah yang dihadapi masyarakat di pesantren adalah bagaimana cara menimbulkan keyakinan warganya bahwa menolak KB adalah mungkin, karena menyalahi ajaran agama dan tujuan perkawinan, dan bahwa pengorbanan kepentingan diri sendiri hanyalah harga rendah yang harus dibayar untuk mendapatkan ganjaran berupa kesejahteraan bersama di masa datang.

⁶³ Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, terj. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.264-266.

Dengan demikian ideologi agama memasuki masalah ini dan menjadi alat elit modern.⁶⁴

Kekuasaan Hegemonik Kyai

Dalam penolakan KB, kyai memang tidak menggunakan cara paksaan (*coersion*), tetapi dengan cara mengubah pola pikir warga dengan mengerahkan seluruh jaringan kekuasaan, lembaga agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Mansoer Fakhri⁶⁵ bahwa agama, pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya digunakan oleh kyai untuk mengaburkan (*mystify*) hubungan kekuasaan, dan menyebabkan masyarakat menerima ideologi baru yaitu penolakan KB. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Gramsci bahwa mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi 'tangan-tangan' kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis itu. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkungannya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan-harapan menurut sistem yang ditentukan.⁶⁶

Dominasi kyai atas masyarakat tersebut dengan demikian berbentuk *consentio*, yaitu bentuk persetujuan pasif dimana masyarakat 'harus' menerima kebijakan tersebut. Jadi pada dasarnya kekuasaan hegemonis itu berlangsung melalui *consensio*. Menurut Gramsci, *consensio* selalu dihubungkan dengan

⁶⁴ Idem, h. 266.

⁶⁵ Mansoer Fakhri, *Masyarakat...*, h. 86.

⁶⁶ Heru Hendarto, *Mengenal...*, h.82.

ungkapan-ungkapan psikologis yang mencakupi berbagai penerimaan aturan sosio-politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Menurut dia, tatanan hegemonis tidak perlu masuk ke dalam lembaga-lembaga ataupun praktek liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitariani dalam arti ketat. Bagi Gramsci, asumsi liberal 'masa kini' dimana orang tidak mempunyai kesempatan sungguh-sungguh untuk mengungkapkan oposisinya, tampaknya sangat aneh. Dikatakannya bahwa dalam suatu perjanjian dengan sendirinya ada disposisi mental, ada titik lemah dan ada kekuatannya.⁶⁷

Hegemoni kyai dalam penolakan KB diantaranya meliputi pembatasan anak dan program-program Kb lainnya kepada masyarakat yang pada dasarnya tidak terlepas pesan-pesan yang dipromosikan kyai sejak awal adanya KB yang berusaha membentuk persamaan pemahaman dengan warganya. Pesan-pesan yang disampaikan kyai tersebut merupakan proses mengubah dan menyadarkan masyarakat akan keuntungan tidak mengikuti KB. Kyai menyadari bahwa penyampaian pesan penolakan KB dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama, menyalahi tujuan perkawinan dan berusaha untuk mengurangi jumlah ummat Islam akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu kyai menyampaikan pesan-pesan penolakan KB dengan menggunakan pembenaran-pembenaran agama untuk meyakinkan warganya bahwa KB itu bertentangan dengan agama.

Pemanfaatan alasan-alasan dan pembenara-pembenaran tersebut juga dilakukan oleh (Nd) dan (Id) yang berperan sebagai 'wajah' kyai untuk

⁶⁷Idem, h. 80.

menggiring kesadaran perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Mereka selalu mengemukakan atau mempermosikan kepada warganya akan keuntungan menolak KB. Pada hakekatnya KB itu tidak berangkat dari upaya untuk mensejahterakan keluarga, tetapi lebih merupakan kebijakan negara yang menyalahi ajaran agama.

Dengan alasan-alasan tersebut warga masyarakatnya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mereka dapat menerima atau menyetujui kebijakan kyai tersebut. Penyampaian pesan dengan alasan-alasan semacam itu pada hakekatnya meletakkan kyai pada posisi dominan yang oleh Gramsci di sebut sebagai kekuatan hegemonik, dalam arti bahwa kekuasaan kyai diterima atau dianggap sah oleh masyarakat. Arief Budiman⁶⁸ mengemukakan bahwa kekuasaan hegemonik dapat diperoleh melalui ideologi. Dikatakannya bahwa kepentingan borjuasi dapat diartikulasikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat. Analog dengan pendapat tersebut, tampak bahwa kyai melalui pondok pesantren berupaya menegakkan kekuasaan hegemonik. Jika seluruh masyarakat percaya dan membenarkan bahwa KB tersebut tidak menguntungkan mereka, berarti kyai berhasil menegakkan kekuasaan hegemonik, walaupun setelah ditelusuri ternyata tidak seluruh warganya menolak KB tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa disatu sisi telah terjadi hegemoni kyai atas perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, tetapi di sisi lain terlihat adanya resistensi dari perempuan Islam tersebut.

⁶⁸Arief Budiman, *Teori ...*, h. 73.

Jika proses penegakan kekuasaan kyai dicermati, maka akan terlihat bahwa kyai dengan otoritasnya selalu berupaya menegakkan kemampuan hegemoniknya dalam penolakan KB. Namun dalam kenyataan di lapangan, penegakkan kekuasaan hegemoni akan selalu menyisakan resistensi. Begitupula dengan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Walaupun warga di pesantren tersebut dapat dikatakan mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi, bukan berarti mereka akan tunduk patuh terhadap sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedalaman hegemoni kyai tidak dapat menyentuh tingkat yang paling dasar, dalam arti kyai mampu menghegemoni warga baik dalam bentuk ide maupun perilaku. Dengan kata lain kekuasaan hegemonik kyai baru menyentuh di tingkat permukaan atau tingkat ide. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pendapat (Nd), (Nm) dan (Id). Mereka dapat dikategorikan sebagai subyek yang mendukung dan memahami kebijakan penolakan KB.

Dalam bentuk penguasaan pikiran, tampaknya sebagian besar warga telah terhegemoni oleh kyai. Jumlah warga yang terhegemoni sampai bentuk perilakunya relatif banyak, diantaranya (Nd) dan (Id). Warga yang terhegemoni dalam hal ini berasal dari kelompok dan lapisan masyarakat yang bervariasi. Hal ini tampaknya tidak terlepas dari keberhasilan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan dalam membentuk kognisi masyarakat untuk menyetujui ide penolakan KB. Oleh karena itu lembaga keagamaan seperti kelompok pengajian

dan pondok pesantren, sering disebut sebagai lembaga pembentuk kognisi masyarakat.

Komponen-Komponen yang Diterima Secara Hegemonik dan Ditolak

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat komponen-komponen yang diterima secara hegemonik dan ditolak dari segala yang diusahakan atau dilakukan kyai. Komponen-komponen penolakan KB dalam hal ini meliputi KB itu bertentangan dengan ajaran agama, menyalahi tujuan perkawinan dan salah satu usaha untuk mengurangi umat Islam. Pada dasarnya terdapat tiga kategori sikap dan perilaku warga di pesantren tersebut dalam merespon penolakan KB tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu yaitu warga yang terhegemoni, warga yang teresistensi superfisial dan teresistensi riil.

Bagi warga yang terhegemoni, seluruh pesan-pesan kyai tentang penolakan KB dapat diterimanya. Mereka dengan penuh kesadaran dapat memahami kebijakan kyai tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman subyek (Nd), (Id) dan (Nm) dimana mereka membenarkan kebijakan kyai tersebut. Alasan-alasan yang digunakan kyai dalam menyampaikan pesan bagi mereka cukup efektif. Pesan yang paling efektif bagi mereka adalah bahwa KB itu bertentangan dengan ajaran agama dan menyalahi tujuan perkawinan.

Dengan menyitir ayat-ayat Al-Quran sebagai alasan pembenar dapat dinilai sangat efektif dalam melembagakan kebijakan kyai. Betapa tidak, dengan menggunakan media interpersonal sehingga 'menggiring' kognisi warga untuk

membenarkan. Dengan bantuan penggunaan bahasa sebagaimana dikemukakan Michael van Langenberg⁶⁷, kyai berusaha menghegemoni masyarakat. Pesan yang terkandung tersebut pada hakekatnya adalah anjuran untuk tidak menyalahi ajaran agama dan tujuan perkawinan.

Bagi kelompok yang teresisten secara superfisial, pada dasarnya mereka dapat menerima kebijakan KB sebatas untuk menjarangkan kelahiran bukan untuk membatasinya. Mereka juga hanya bisa menerima beberapa alat kontrasepsi tertentu saja, khususnya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Subyek yang teresistensi secara riil akan menerima sepenuhnya ide KB betapapun sederhananya. Mereka yang teresistensi baik secara superfisial maupun riil mempunyai pengetahuan, pemahaman dan keyakinan serta alasan yang rasional yang tidak begitu saja dapat dipengaruhi oleh kekuatan lain.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa untuk menyampaikan pesan-pesannya kyai memanfaatkan lembaga-lembaga agama. Lembaga-lembaga ini ternyata mampu berperan sebagai lembaga pembentuk kognisi perempuan Islam di pesantren tersebut. Hingga saat ini lembaga yang dinilai paling menentukan atau menjadi panutan masyarakat adalah lembaga-lembaga keagamaan.

Keterlibatan lembaga dan tokoh agama khususnya agama Islam tersebut di satu sisi mencerminkan bahwa masyarakat masih lebih menempatkan lembaga

⁶⁹ Michael van Langenberg, "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony", dalam Aief Budiman, (eds), *State and Civil Society in Indonesia*, (Center of Southeast, Asian Studies: Monash University, 1992), h. 123.

dan tokoh agama sebagai panutan. Namun disisi lain, keterlibatan lembaga atau tokoh agama pada hakekatnya justru mencerminkan dominasi kekuasaan kyai sehingga dapat 'memanfaatkan' lembaga atau tokoh agama tersebut untuk mendukung kebijakannya, seperti yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi 'tangan-tangan' kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Dengan demikian pada hakekatnya apa yang dilakukan kyai dalam mendominasi warga agar menolak KB, sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh gramsci tersebut.

Dalam kenyataannya terdapat keragaman pemahaman, sikap dan perilaku warga dalam menghadapi kebijakan kyai tersebut. Sebagian warga, seperti (Nd), (Id), (Nm) dan (Sh) dapat menerima dan memahami apa yang dikehendaki kyai, dan mereka secara sukarela mau mengikutinya. Pesan yang dipropagandakan kyai tampaknya sesuai dengan jalan pikiran mereka. Oleh karena itu, walaupun dominasi kyai bukanlah satu-satunya variabel penyebab bahwa seseorang dapat memahami penolakan terhadap KB, namun ada semacam persamaan kebutuhan. Dengan kata lain kyai memanfaatkan kebutuhan warga untuk dijadikan alat propaganda untuk keberhasilan terhadap kebijakannya dalam penolakan KB. Ketika warga masyarakat telah beranggapan bahwa kebijakan itu menguntungkan seluruh warga, disinilah sebenarnya kyai telah mampu menegakkan kekuasaan hegemoniknya.

Di pihak lain terdapat kelompok warga yang bersikap resisten baik secara superfisial maupun riil terhadap kebijakan penolakan KB. Kelompok

warga yang teresisten secara superfisial menunjukkan sikap adaptasi namun dia resisten sekaligus. Fenomena ini tercermin pada subyek (Nh). Mereka mampu menetrjemahkan kebijakan KB menurut pemahaman mereka dimana tujuan KB menurut mereka adalah semata-mata adalah untuk menjarangkan kelahiran, bukan untuk membatasi kelahiran. Namun sebenarnya dengan pemahaman mereka tersebut, secara tidak langsung KB juga akan membatasi jumlah anak. Karena dengan jarak kelahiran yang jauh yaitu minimal 5 tahun, maka dari sisi umur, kesempatan seorang ibu untuk melahirkan banyak anak semakin berkurang.

Pilihan alat kontrasepsi tampaknya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan mereka terhadap agama. Warga yang termasuk dalam kategori resistensi superfisial ini memilih alat kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti pil dan suntik, bukan alat kontrasepsi lain seperti IUD dan sterilisasi. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dikemukakan (Ah), walaupun sebenarnya pada tahun 1990 para tokoh agama telah memutuskan untuk mendukung penggunaan kontrasepsi mantap. Alasan subyek tidak mau menggunakan alat kontak tersebut karena mengikuti petunjuk dari kyai di pesantren. Hal ini dapat diartikan bahwa warga masyarakat tidak lagi dapat dianggap sebagai subyek yang harus menerima begitu saja tentang apa yang ditentukan kyai, tetapi mereka harus lebih diperlakukan sebagai subyek yang dapat menentukan pilihannya secara rasional dan menurut keyakinannya.

Di samping terdapat warga yang terhegemoni penuh dan teresistensi yang bersifat superfisial, terdapat pula warga yang menolak penuh atau teresistensi secara riil terhadap penolakan KB. Betapapun secara kuantitatif jumlahnya sangat

sedikit, namun hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak seluruh warga tunduk patuh dan berusaha menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Fenomena ini terbaca ketika peneliti menemui keluarga (Hn). Dengan alasan yang sederhana namun rasional, mereka berpendapat bahwa masalah keluarga adalah masalah atau hak pribadi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk kyai. Mereka juga tidak bisa dianggap sebagai kelompok yang tidak mengerti apa-apa, karena pada kenyataannya mereka mempunyai pengetahuan tersendiri untuk memaknai kehidupannya. Pilihan sikap dan perilaku mereka pada hakekatnya mencerminkan kepatuhan mereka terhadap apa yang memang seharusnya mereka terima/jalani.

Dari sisi tingkat kemampuan ekonomi warga terlihat bahwa keluarga yang secara ekonomi relatif sudah mapan menunjukkan sikap yang kurang patuh kepada kebijakan kyai daripada keluarga yang secara ekonomi relatif kurang mampu. Kepatuhan mereka terhadap aturan pesantren tampaknya tidak secara langsung karena hegemoni kyai, namun didorong oleh variabel lain seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Pada hakekatnya penegakan kekuasaan hegemoni kyai tidak selalu secara langsung namun lebih banyak menggunakan alasan-alasan tertentu yang menyentuh kebutuhan seseorang. Jika hal ini dapat dilakukan, maka pada dasarnya hegemoni kyai telah dapat ditegakkan sebagaimana yang dikemukakan Arief Budiman, walaupun tentu saja masih banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan warga terhadap kebijakan kyai tersebut.

Sedangkan tipe keluarga yang paling resisten terhadap kebijakan kyai adalah keluarga-keluarga yang secara sosial ekonomi relatif mampu dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini bukan berarti mereka tidak pernah mengetahui tentang kebijakan kyai yang ada mengenai penolakan KB. Dengan demikian mereka bukan tidak tahu sama sekali tentang aturan tersebut, namun mereka mempunyai pengetahuan dan keyakinan tersendiri antara lain dengan pernyataan dengan keluarga berencana mereka telah memberikan yang terbaik buat keluarganya.

BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS

Simpulan

Pemerintah telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dari bagian pertama strategi pembangunan Indonesia. Dengan berdasar pada pilihan pembangunan ekonomi yang strategis itu pula negara menentukan kebijakan KB. Dasar pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat jika jumlah penduduk akan ditekan sekecil mungkin. Dapat dipahami bahwa pilihan kebijakan KB oleh pemerintah pada hakikatnya demi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi.

Berbeda dengan jaman kepemimpinan Orde Lama yang pronatalis, Orde Baru justru sebaliknya yaitu antinatalis. Dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan dan cepatnya laju pertumbuhan penduduk, pada tahun 1970 program KB resmi menjadi program pemerintah yang ditandai dengan berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan dikoordinasikan oleh BKKBN ini, pemerintah beserta segenap potensi masyarakat yang ada melakukan pelebagaan program KB ini. Dalam pelebagaan program KB tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menerima, karena masih adanya kelompok masyarakat yang resisten. Dalam penolakan terhadap program KB oleh kelompok masyarakat tersebut, ini menunjukkan

dominasinya terhadap warga (perempuan Islam) yang oleh Gramsci disebut sebagai kekuasaan hegemonik. Pemimpin (kyai) mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat (perempuan Islam) untuk mengikuti idenya tersebut.

Cara yang ditempuh kyai dalam mensosialisasikan penolakan program KB tersebut adalah relatif halus atau tanpa menggunakan paksaan (*coersion*). Cara yang digunakan lebih ditekankan pada usaha untuk mengubah kesadaran warga masyarakat akan tidak pentingnya Program KB tersebut atau melalui cara *consencio* yang merupakan ciri hegemoni dimana warga masyarakat 'dipaksa' menerima secara pasif ide dominan. Melalui lembaga agama, kyai tampaknya memang berhasil merubah pola pikir warga masyarakat dalam menilai kebijakan KB. Model penolakan KB yang tanpa 'paksaan' dengan menggunakan lembaga-lembaga tersebut dinilai langsung 'menyentuh' kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dibuat tunduk dan patuh sebagai bentuk hegemoni kyai. Walaupun konsep hegemoni Gramsci yang digunakan sebagai acuan berawal dari konsep hegemoni yang ada dinegara kapital, namun hegemoni sebagai model dominasi kelompok kekuasaan dominan yang digunakan untuk membentuk kesadaran kelompok sub ordinat, terdapat persamaan model dengan yang dilakukan dalam menolak kebijakan KKBS, tidak terkecuali di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa.

Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa merupakan wilayah yang dekat dengan ciri perkotaan. Mobilitas masyarakatnya cukup tinggi, hal ini dikarenakan letaknya yang berada di pusat kota Maros. Masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa secara lahiriah cukup terbuka terhadap

perubahan. Keterbukaan masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa dalam menerima perubahan tidak berlaku terhadap program KB dan dimanfaatkan oleh pemimpinnya untuk menegakkan kekuasaan hegemonik dalam penolakan kebijakan KB. Oleh karena itu dalam hubungan masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa dengan pemimpinnya khususnya dalam penolakan KB, telah berlangsung proses hegemoni kyai atas perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Pemimpin (kyai) telah berusaha menyampaikan segala bentuk pesan-pesan tentang KB yang melalui media interpersonal seperti forum-forum pengajian. Target penyampaian pesan-pesan tersebut adalah perubahan pola pikir atau kesadaran wanita Islam Maccopa agar mempunyai pemahaman yang sama dengan pemimpin akan KB. Target berikutnya adalah merubah perilaku perempuan Islam Maccopa agar tidak bersedia menjadi peserta KB.

Kedua, Pemimpin membentuk lembaga-lembaga keagamaan yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemimpin seperti kelompok pengajian. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga pembentuk kognisi perempuan Islam. Dengan adanya kelompok pengajian tersebut pemimpin dapat dengan mudah mengontrol keadaan/pelaksanaan KB.

Ketiga, Pemimpin berusaha menanamkan ideologi agama dengan kuatnya sehingga merasuk jauh kedalam kehidupan perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa. Warga Maccopa yang dikenal taat beragama

Islam yang diperkirakan mempunyai resistensi yang kuat terhadap ideologi lain ternyata tidak seluruhnya dapat mengelak dari dominasi pemimpin/kyai.

Disisi lain, tidak mudah untuk mengatakan bahwa seluruh perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa telah terhegemoni oleh pemimpin. Walaupun hegemonisasi berproses kuat dan segala macam diskursus agama melingkupi perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, namun resistensi sosial tidak dapat dihindari, tidak begitu saja dengan mudah dikonstruksi oleh kekuatan dari luar dirinya termasuk pemimpin/kyai. Mereka mempunyai pemahaman, keyakinan dan pengetahuan yang rasional. Mereka tidak dapat dinilai sebagai kelompok yang tidak tahu apa-apa dan dengan mudah bersedia menyesuaikan dengan sistem nilai yang dihadapi.

Kedalaman proses hegemoni kyai atas perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa belum mampu menyentuh tingkat yang paling mendasar yaitu perubahan perilaku perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa agar bersedia menolak menjadi peserta KB. Kedalaman hegemoni kyai tersebut baru mampu merubah pola pikir atau kesadaran warga akan adanya kebijakan KB. Pergumulan dan tarik menarik antara proses hegemoni kyai dan resistensi warga masih terus berlangsung.

Atas dasar pemahaman perempuan Islam di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, muncul keragaman sikap dan perilaku yang pada dasarnya terbagi kedalam tiga kategori yaitu mereka yang terhegemoni penuh baik sikap maupun perilakunya, mereka yang terresistensi secara superfisial dan mereka yang terresistensi secara riil. Keragaman pemahaman perempuan Islam di Pondok

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa dalam menghadapi kebijakan KB ini diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial ekonomi dan pengalaman pribadi. Bagi subyek yang terhegemoni, variabel-variabel tersebut lebih berperan sebagai variabel antara. Sedangkan bagi subyek yang teresistensi variabel-variabel tersebut merupakan variabel pengaruh.

Penelusuran di lapangan membuktikan bahwa konsep hegemoni Gramsci tampaknya berlaku di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa, walaupun tidak dalam konteks yang sama persis. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni tidak saja dapat terjadi di negara kapitalis. Secara empiris hegemoni dapat terjadi dalam berbagai bidang sebagai mana halnya dalam penolakan kebijakan KB, dimana pemimpin/kyai mendominasi ide dan pikiran masyarakat. Jadi pada dasarnya hegemoni dapat terjadi pada pemimpin yang otoriter bahkan totaliter. Di sisi lain gencarnya hegemonisasi kyai atas perempuan Islam tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan pola pikir warga secara menyeluruh. Hasil di lapangan lebih menyakinkan konsep Gramsci yang menyatakan bahwa hegemoni akan selalu menyisakan resistensi di masyarakat. Terbukti bahwa masyarakat mempunyai nilai-nilai tersendiri seperti nilai agama dan nilai moral, sehingga mereka mampu bersikap rasional dalam menghadapi realitas yang ada. Hal inilah yang dijadikan alasan untuk tidak mengikuti kebijakan pemimpin/kyai sehingga timbul resistensi di masyarakat baik secara superfisial maupun secara riil.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memunculkan tesis bahwa hegemoni dapat menyangkut masalah kebijakan kyai seperti penolakan terhadap program KB. Kekuasaan hegemonik kyai dalam penerapan penolakan program KB dapat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku atau pemahaman warga masyarakat tentang KB. Namun demikian, hegemoni juga selalu menyisakan resistensi di masyarakat. Atau dengan kata lain sekuat apapun kekuasaan hegemonik kyai terhadap warga masyarakat tidak akan selalu melahirkan persamaan pemahaman antara pemimpin/kyai dan masyarakat.

Implikasi teoritik penelitian ini adalah di samping melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam pemilihan alat kontrasepsi seperti penelitian oleh I.B. Wirawan dan Bagong Suyanto serta Yusmilarso. Keduanya mencoba melihat bahwa adanya pengaruh norma kelompok yang mempengaruhi perempuan dalam penerimaan keluarga berencana selain variabel agama, demografis dan sosial psikologis. Namun kedua penelitian tersebut belum menunjukkan secara jelas hubungan antara keduanya. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menutupi kekurangan penelitian-penelitian terdahulu dengan menawarkan perspektif baru yaitu hegemoni kyai yang menjelaskan pengaruh pemimpin dalam penolakan keluarga berencana yang tidak disinggung di kedua penelitian tersebut.

Bagi kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pemerintah atau pengambil keputusan dalam hal pendekatan dengan tokoh informal khususnya tokoh keagamaan dalam penerapan

kebijakan KB. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan pemahaman warga masyarakat sebelum menentukan sebuah kebijakan yang 'harus' diterima oleh warga masyarakat, karena pada kenyataannya masyarakat mempunyai pemahaman tersendiri akan keluarga mereka, yang dipengaruhi oleh kebiasaan moral, agama dan sebagainya.

Walaupun dalam penelitian ini telah dijelaskan proses-proses sosial yang menandai hegemoni kyai, namun kajian tentang keterlibatan lembaga/institusi keagamaan pendukung penolakan KB masih terbatas pada hal-hal yang bersifat umum atau kajian yang dilakukan kurang terfokus pada lembaga-lembaga tertentu. Disamping itu pengkategorian pemahaman keagamaan subyek tidak dilakukan dalam penelitian ini atau dengan kata lain pemahaman keagamaan subyek dianggap sama. Untuk itu bagi peneliti lain yang hendak mengkaji masalah sejenis kiranya dapat lebih difokuskan pada kajian kelembagaan secara mendalam dan mengadakan pemilahan pemahaman keagamaan subyek kaitannya dengan hegemoni kyai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Yaumul.A., "Pembangunan Keluarga Sejahtera Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa", *Prisma* No. 6.
- Asfar, Muhammad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kyai", dalam *Prisma*, No. 5, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Adrina,dkk, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Bellamy, Richard, *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*, (Yogyakarta: LP3ES, 1990).
- BKKBN, *Dua Dasa Warsa Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 1990).
- , *Informasi dasar Kependudukan Keluarga Berencana 1979*, (Jakarta: BKKBN, 1979).
- , *Informasi Gerakan KB Nasional Selama PJP I*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1994).
- Bocock, Robert, *Hegemony*, (London: Tavistock Publication Limited, 1986).
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven.J., *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1975).
- Budiman, Arief, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi: LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989).
- Fakih, Mansoer, *Masyarakat Sipil, Untuk Transformasi, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Glucksman, Christine.Buci., *Gramsci and the State*, (London: Lawrence and Wishart, 1980).



- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Hoare, Quintin dan Smith, Geoffrey.N., *Selections from the Prison of Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: Internasional Publishers, 1992).
- Hull,T, dan Hull,V., "Politics, Culture and Fertility: Transition in Indonesia", *Makalah dalam John Caldwell Seminar: the Continuing Demographic Transition*, (Canberra: August, 14-17, 1995).
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, *Duapuluh Lima Tahun Gerakan KB*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Koblinsky, Marge, eds, *Kesehatan Wanita: Sebuah Perspektif Global* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1997).
- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1993).
- Langenberg, van Michael, "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony" dalam Arief Budiman, eds, *State and Civil Society in Indonesia*, (Center of Southeast, Asian Studies: Monash University: 1992).
- Latif, Yudi dan Subandi, Idy, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Larrain, Jorge, *Konsep Ideologi*, (Yogyakarta: LKP3M, 1997).
- Lauer, Robert. H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Mitchell, Timothy, *Everyday Methapors of Power*, (New York: Departement of Politics, New York University, 1990).
- Moerdjati, Sri, "Sumber-Sumber Informasi Wanita Pedesaan Untuk Memperoleh Informasi Tentang KB", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1993).
- Moleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

- Patria, Nezar, dan Arief, Andi, *Antonio Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Pramutanto, Wisnu, "Hambatan-Hambatan Pelaksanaan KB di Pedesaan: Telaah Hubungan Elit-Massa di Tingkat Lokal: Studi Kasus di Kec. Rawan Gresik", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1990).
- Rajagukguk, Omas.B., "Contraceptive Choice in Indonesia: 1987 and 1991", *Asia Pacific Population Journal*, Vol. 13 No.1 March, 1998.
- Singarimbun, Masri, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Springa, Daniel.T., "Praktek KB di Lingkungan Pasangan Usia Subur Muda di Perkotaan", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1988).
- Spradley, James. T., *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1997).
- Subandi, Idy dan Malik, Jamaluddin Dedy., *Hegemoni Budaya*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997).
- Suyanto, Bagong, dkk. (ed), *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Utami, Sri Wiryanti Budi, "Pria/Wanita: Studi Perbedaan Wacana Proses Pengambilan Keputusan Masalah Publik di Lingkungan Kelompok", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, 1997.
- Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994).
- Wirawan, I.B. dan Suyanto, Bagong, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Kaum Wanita dalam Kegiatan KB", *Laporan Hasil Penelitian*, (Surabaya: BKKBN dan FISIP UNAIR, 1991).
- Wiyono, Hadi, "Jalan Panjang Menuju Keluarga Kecil yang Bahagia", *Warta Demografi*, Th. ke. 25. No. 2, (Jakarta: UI, 1995).
- Yusmilarso, "Dimensi-Dimensi Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah", *Laporan Hasil Penelitian*, (Semarang: BKKBN dan PPSK UNDIP, 1992).